

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dapat disusun dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai dasar Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan juga menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah masih banyak terdapat kelemahan yang perlu dibenahi, untuk itu pemerintahan kedepan dapat menyempurnakan pembangunan daerah kedepan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ucapan terima kasih atas peran serta dan dukungan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat dan seluruh *stakeholder* sehingga target kerja dan prestasi pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik.

Ampapa, 28 Maret 2025
BUPATI TOJO UNA-UNA

ILHAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8656);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una terletak di pesisir pantai dan perairan teluk tomini. Secara geologis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada Lipatan Fennema dan Tineba yang terbentang di bagian Barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, deretan pegunungan verbeek di bagian Tenggara, dan Pegunungan Lumut di bagian Timur Laut. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan teluk Tomini/Provinsi Gorontalo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Morowali

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Poso

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banggai

Batas wilayah administrasi antar Kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una seperti diuraikan secara rinci dalam Gambar 1



Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Tojo Una-Una

2. Luas Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas 5.721,51 km² terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan. Wilayah Tojo Una-Una terbagi menjadi dua kategori yaitu wilayah daratan 6 kecamatan dan kepulauan 6 kecamatan.

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.721,51 km² dan luas laut 3.566,21 km², dengan panjang pantai ± 951,115 km. Wilayah daratan meliputi 6 kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai. Sedangkan wilayah kepulauan yang terdiri dari 6 kecamatan merupakan gugusan pulau-pulau yang berjumlah sekitar 483 pulau dengan 81 pulau yang sudah memiliki nama dan 41 pulau di antaranya sudah berpenghuni. Secara geografis, Kabupaten Una-Una terletak antara 00 06'56" Lintang Utara sampai 020 01'41" Lintang Selatan dan 1210 05'25" Bujur Timur sampai 1230 06' 17" Bujur Timur. Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una-una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada diantara 1-800 meter di atas permukaan laut

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Jumlah Pulau
1	Tojo Barat	1.092,27	19,09	-
2	Tojo	1.065,48	18,62	-
3	Ulubongka	1.767,11	30,89	-
4	Ampana Tete	796,02	13,91	5
5	Ampana Kota	175,42	3,07	1
6	Ratolindo	61,88	1,08	-
7	Una-Una	146,16	2,55	92
8	Batudaka	151,91	2,66	164
9	Togean	229,51	4,01	73
10	Walea Kepulauan	67,6	1,18	31
11	Talatako	83,64	1,46	103
12	Walea Besar	84,51	1,48	14
Kabupaten Tojo Una-Una		5.721,51	100	483

Sumber data : Kabupaten Dalam Angka 2025 BPS Tojo Una-Una

3. Topografi dan Morfologi

Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una-una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada diantara 1-800 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una-Una bervariasi mulai dari kemiringan $0-20^{\circ}$ (Datar-landai), tersebar di seluruhkecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Kondisi tanah ini sangatpotensial dimanfaatkan untuk pemukiman. Topografi kemiringan $3-150^{\circ}$ (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, tetapi diperlukan usaha konser-vasi tanah dan air. Tanah dengan kemiringan $16-400^{\circ}$ (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun, perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi. Terakhir kemiringan di atas 40° , merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena, erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

Kawasan Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah dengan kelerengan 0-8% tersebar di seluruh kecamatan pada daerah yang mendekati perairan laut (pantai/pesisir). Menjauhi laut, kelerengan bervariasi antara 8-45%. Semakin menjauhi laut umumnya semakin bergelombang/terjal. Pada pulau Una - Una terdapat lahan dengan kelerengan sangat terjal yaitu $> 45\%$.

Morfologi pegunungan ditunjukkan oleh adanya tonjolan tonjolan yang kasar dan berlereng terjal. Secara umum morfologi pegunungan ini tersusun oleh batuan ultramafik, batuan mafik dan batugamping. Pada pegunungan yang tersusun oleh batugamping telah menunjukkan adanya proses karstifikasi sehingga memperlihatkan kenampakan morfologi kras berupa dolina, gua dan sungai bawah tanah. Lembah sungai yang mengalir berbentuk huruf V serta banyak dijumpai adanya air terjun. Hal ini menunjukkan

tingkat perkembangan sungai yang termasuk masih muda ataupun karena adanya struktur geologi yang berupa sesar sehingga mengakibatkan bentukan bentukan seperti undak disepanjang aliran sungai. Pola aliran sungainya meranting dan hampir sejajar.

Morfologi perbukitan menempati daerah diantara pegunungan dan dataran, termasuk yang ditemukan di Kepulauan Togean dan Pulau Una-Una dengan ketinggian antara 50 hingga 700 meter di atas muka laut. Dibeberapa tempat menunjukkan rangkaian perbukitan yang bergelombang dan secara setempat diselingi oleh puncak yang tajam dari batugamping. Mempunyai kemiringan landai sampai agak curam, kadang dikawasan pantai morfologi ini membentuk undak batugamping. Batuan penyusun yang membentuk morfologi ini adalah batuan ultramafik, batuan mafik, batugamping, batuan gunungapi dan sedimen klastik. Pola aliran sungai dapat digolongkan ke dalam meranting dan sejajar atau hampir sejajar. Dataran rendah menempati daerah disepanjang pantai dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 50 meter di atas muka laut. Dataran pantai yang cukup luas dijumpai di sekitar Kota Ampana. Sungai yang mengalir umumnya berkelok dan berlembah yang lebar. Satuan morfologi dataran rendah ini dibentuk oleh endapan sungai dan endapan pantai.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dapat dibedakan dalam delapan jenis tanah yaitu aluvial, gleisol, grumosol, kambisol, litosol, mediteran, podsolik, dan regosol. Secara umum, jenis tanah di Kabupaten Tojo Una - Una adalah kambisol baik di wilayah daratan maupun kepulauan terutama sebagian Kecamatan Una-Una dan sebagian Kecamatan Togean. Jenis tanah di Pesisir Kecamatan Tojo Barat, Ampana Kota, Ampana Tete dan sebagian kecil peisir Kecamatan Tojo adalah aluvial. jenis tanah grumosol terdapat di Kecamatan Togean dan Kecamatan Walea Kepulauan. Sedangkan Kecamatan Walea Besar hampir seluruhnya berjenis tanah gleisol. Selain jenis tanah kambisol, jenis litosol juga banyak ditemui di wilayah Kabupaten Tojo Una - Una.

c. Data Demografi

Penyebaran Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una sebahagian besar tinggal di ibukota kecamatan, yaitu Kecamatan Ampana Kota, sebanyak **22.342** Jiwa tinggal di daerah tersebut sementara yang lebih besar penduduknya adalah Kecamatan Ratolindo sebanyak **30.614** jiwa. Hal ini dianggap wajar dan cukup beralasan karena Kecamatan Ratolindo dahulu merupakan bagian dari ibukota kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Selanjutnya penduduk banyak juga tinggal di Kecamatan Ampana Tete yaitu sebesar **29.583** jiwa sedangkan Kecamatan Walea Besar dengan jumlah proporsi penduduk terkecil, yaitu sebanyak **4.589** jiwa dari total Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Pada Tahun 2024 secara keseluruhan Struktur Jumlah penduduk pun berubah tercatat terdapat **88.426** jiwa penduduk laki-laki dan **84.039** jiwa penduduk perempuan dengan total jumlah penduduk **172.465** jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Struktur penduduk Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Una-Una	4.390	4.132	8.522
Togean	5.580	5.240	10.820
Walea Kepulauan	2.954	2.787	5.741
Ampana Tete	15.315	14.268	29.583
Ampana Kota	11.411	10.931	22.342
Ulubongka	10.250	9.351	19.601
Tojo Barat	6.793	6.413	13.206
Tojo	7.658	7.261	14.919
Walea Besar	2.427	2.162	4.589
Ratolindo	15.234	15.380	30.614
Batudaka	3.111	2.877	5.988
Talatako	3.303	3.237	6.540
Total	88.426	84.039	172.465

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Janis Kelamin
Tahun 2024

Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Una-Una	2.163	518	2.681
Togean	2.636	620	3.256
Walea Kepulauan	1.361	379	1.740
Ampana Tete	7.781	1.667	9.448
Ampana Kota	5.798	1.411	7.209
Ulubongka	5.359	985	6.344
Tojo Barat	3.496	857	4.353
Tojo	4.007	1.035	5.042
Walea Besar	1.135	303	1.438
Ratolindo	7.785	2.177	9.962
Batudaka	1.524	304	1.828
Talatako	1.565	409	1.974
Total	44.610	10.665	55.275

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1.4
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Tahun 2024

Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Una-Una	2.163	518	2.681
Togean	2.636	620	3.256
Walea Kepulauan	1.361	379	1.740
Ampana Tete	7.781	1.667	9.448
Ampana Kota	5.798	1.411	7.209
Ulubongka	5.359	985	6.344
Tojo Barat	3.496	857	4.353
Tojo	4.007	1.035	5.042
Walea Besar	1.135	303	1.438
Ratolindo	7.785	2.177	9.962
Batudaka	1.524	304	1.828
Talatako	1.565	409	1.974
Total	44.610	10.665	55.275

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	16.946	15.399	32.345
Belum Tamat SD/Sederajat	11.074	9.949	21.023
SD	24.516	23.761	48.277
SLTP	13.057	11.835	24.892
SLTA	18.470	16.787	35.257
Diploma I, II dan III	937	2.018	2.955
S1, S2, DAN >S2	3.426	4.290	7.716
Total	70.112	67.509	137.621

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Data Kecamatan dan Kelurahan

Secara administrasi Kabupaten Tojo Una-Una terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 12 Kelurahan dan 134 Desa. Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Ampana Tete terdiri dari 20 Desa, sementara Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit adalah Kecamatan Tatalako terdiri dari 6 Desa. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2020 diuraikan secara rinci dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Data Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Una-Una	11	-
2.	Togean	16	-
3.	Walea Kepulauan	9	-
4.	Ampana Tete	20	-
5.	Ampana Kota	4	6
6.	Ulubongka	18	-
7.	Tojo Barat	13	-
8.	Tojo	16	-
9.	Walea Besar	8	-
10.	Ratolindo	4	6
11.	Batudaka	9	-
12.	Talatako	6	-
	Jumlah	134	12

Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka 2025 BPS Tojo Una-Una

e. **Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari berbagai badan, dinas, dan kecamatan juga terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dalam reformasi birokrasi menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kinerja perangkat daerah sehingga lebih terukur dan untuk memberikan kepastian hukum maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Peraturan Daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022.

Adapun data perangkat daerah kabupaten Tojo Una-Una secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7
Daftar Perangkat Daerah Menurut Dasar Hukum
Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Perda Nomor 10 Tahun 2022
2	Dinas Perikanan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perda Nomor 10 Tahun 2022
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 10 Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perda Nomor 10 Tahun 2022
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda Nomor 10 Tahun 2022
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perda Nomor 10 Tahun 2022
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perda Nomor 10 Tahun 2022
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Nomor 10 Tahun 2022
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
15	Dinas komunikasi dan Informatika	Perda Nomor 10 Tahun 2022
16	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Perda Nomor 10 Tahun 2022
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
20	Badan Pendapatan Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Nomor 10 Tahun 2022
23	Kecamatan Ampana Kota	Perda Nomor 10 Tahun 2022
24	Kecamatan Ratolindo	Perda Nomor 10 Tahun 2022
25	Kecamatan Ampana Tete	Perda Nomor 10 Tahun 2022
26	Kecamatan Tojo Barat	Perda Nomor 10 Tahun 2022
27	Kecamatan Tojo	Perda Nomor 10 Tahun 2022
28	Kecamatan Ulubongka	Perda Nomor 10 Tahun 2022
29	Kecamatan Una-Una	Perda Nomor 10 Tahun 2022
30	Kecamatan Batudaka	Perda Nomor 10 Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
31	Kecamatan Togeang	Perda Nomor 10 Tahun 2022
32	Kecamatan talatako	Perda Nomor 10 Tahun 2022
33	Kecamatan Walea Kepulauan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
34	Kecamatan Walea Besar	Perda Nomor 10 Tahun 2022

Sumber Data : Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una

Tabel 1.8
Daftar Perangkat Daerah (UPT Puskesmas)
Menurut Dasar Hukum Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	UPT Puskesmas Ampana Barat	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
2	UPT Puskesmas Ampana Timur	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
3	UPT Puskesmas Tete	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
4	UPT Puskesmas Dataran Bulan	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
5	UPT Puskesmas Matako	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
6	UPT Puskesmas Tombiano	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
7	UPT Puskesmas Uekuli	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
8	UPT Puskesmas Marowo	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
9	UPT Puskesmas Wakai	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
10	UPT Puskesmas Dolong	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
11	UPT Puskesmas Popolii	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
12	UPT Puskesmas Lebiti	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
13	UPT Puskesmas Pasokan	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
14	UPT Puskesmas Watusongu	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
15	UPT Puskesmas Kalia	Perbup Nomor 28 Tahun 2023
16	UPT Puskesmas Molowagu	Perbup Nomor 28 Tahun 2023

Sumber Data : Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una

Tabel 1.9
Daftar Perangkat Daerah (UPT RSU)
Menurut Dasar Hukum Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	UPT RSUD Ampana kelas C	Perbup Nomor 29 Tahun 2023
2	UPT RSUD Wakai kelas D	Perbup Nomor 29 Tahun 2023
3	UPT RSUD Pratama Togean kelas D Pratama	Perbup Nomor 29 Tahun 2023

Sumber Data : Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15	3194	32	3241
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	45	121	175
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		10	21	188	394
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		11	11	18	40
5	Satuan Polisi Pamong Praja		11	4	351	366
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6	6	32	44

7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	9	9	31	49
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		6	4	32	42
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		6	8	27	41
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5	-	33	38
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		8	11	3	22
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
13	Dinas Komunikasi dan Informatika		7	9	35	51
14	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup		17	-	87	94
15	Dinas Perikanan	Urusan Pemerintahan Pilihan	9	15	107	131
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		9	9	43	61
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		13	67	167	
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		9	10	80	99
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		10	15	26	51
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah		6	8	47	61
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		5	15	21	41

22	Badan Pendapatan Daerah		5	-	16	21
23	Inspektorat Daerah		9	27	8	44
24	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Pemerintahan	47	-	184	231
25	Sekretariat DPRD		10	-	92	102

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola pada tahun 2024 sebesar **Rp. 1.437.708.835.974** dengan realisasi **Rp. 1.351.141.008.844** atau sebesar **93,97%** untuk melaksanakan seluruh urusan. Berikut disajikan laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Rupiah)
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.372.442.394.655,00	1.368.294.813.270,95	99,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.329.306.220,00	85.381.519.063,65	114,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.287.610.966.078,00	1.273.155.200.610,00	98,88
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.110.127.487.000,00	1.092.473.085.346,00	98,41
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	134.142.301.000,00	134.142.301.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.341.178.078,00	46.539.814.264,00	107,38
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.502.122.357,00	9.758.093.597,30	92,92
5	BELANJA DAERAH	1.437.708.835.974,00	1.377.190.655.956,31	95,79
5.1	BELANJA OPERASI	1.020.730.742.469,87	966.956.083.048,31	94,73
5.2	BELANJA MODAL	220.774.282.078,13	214.284.184.008,00	97,06
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	304.847.526,00	51.425.000,00	16,87
5.4	BELANJA TRANSFER	195.898.963.900,00	195.898.963.900,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT	(65.266.441.319,00)	(8.895.842.685,36)	13,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH	65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	56.370.598.633,35	0,00

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

h. Pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD merupakan dokumen yang berisi program, kegiatan, lokasi, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan. Pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.12
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		821.335.103.271,00	778.938.712.343,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		346.134.593.358,00	322.498.704.303,00
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		346.134.593.358,00	322.498.704.303,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	256.975.845.041,00	234.114.762.830,00
		Program pengelolaan pendidikan	89.158.748.317,00	88.383.941.473,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		252.688.328.444,00	243.720.950.390,81
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA		100.428.508.885,00	100.398.053.699,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	96.575.017.473,00	96.590.937.503,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	3.850.491.412,00	3.804.716.196,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	3.000.000,00	2.400.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI		21.858.232.306,00	20.721.627.515,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.029.721.038,00	12.897.974.881,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	7.828.511.267,00	7.823.652.634,00
4	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN		3.341.041.573,00	3.247.010.447,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.736.839.613,00	1.653.849.389,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.604.201.960,00	1.593.161.058,00
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		127.060.545.680,00	119.354.258.729,81
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	62.747.594.826,00	58.679.641.450,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	62.273.157.073,00	58.683.440.925,81
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.437.165.100,00	1.414.491.354,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	366.131.000,00	358.461.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	236.497.681,00	218.224.000,00
		Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	183.938.966.426,00	175.946.096.473,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		183.938.966.426,00	175.946.096.473,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	13.624.011.562,00	12.758.169.945,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	13.718.067.800,00	13.685.004.872,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	138.670.000,00	130.320.000,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.122.884.035,00	6.115.593.000,00
		Program pengembangan permukiman	19.796.284.990,00	19.538.897.620,00
		Program penataan bangunan gedung	710.849.000,00	710.082.802,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	20.551.027.836,00	20.047.482.453,00
		Program penyelenggaraan jalan	108.582.461.203,00	102.366.340.532,00
		Program pengembangan jasa konstruksi	230.552.000,00	130.965.610,00
		Program penyelenggaraan penataan ruang	464.158.000,00	463.239.639,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11.223.373.000,00	10.808.733.290,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		11.223.373.000,00	10.808.733.290,00
		Program pengembangan perumahan	341.110.000,00	338.155.000,00
		Program kawasan permukiman	1.639.060.000,00	1.635.250.000,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	9.243.203.000,00	8.835.328.290,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.087.769.411,00	17.304.982.534,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		13.528.811.833,00	12.899.615.721,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.271.599.183,00	11.645.560.545,00
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	848.126.950,00	847.126.133,00
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	409.085.700,00	406.929.043,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		4.558.957.578,00	4.405.366.813,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.792.852.658,00	3.643.688.128,00
		Program penanggulangan bencana	766.104.920,00	761.678.685,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		9.262.072.632,00	8.659.245.353,00
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.262.072.632,00	8.659.245.353,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.141.139.882,00	5.550.097.603,00
		Program pemberdayaan sosial	767.750.000,00	764.222.120,00
		Program rehabilitasi sosial	282.418.000,00	279.606.380,00
		Program perlindungan dan jaminan sosial	1.920.400.000,00	1.915.969.500,00
		Program penanganan bencana	140.174.750,00	139.159.750,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	10.190.000,00	10.190.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		86.883.467.097,00	82.327.722.995,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		5.913.517.152,00	5.239.663.153,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.913.517.152,00	5.239.663.153,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.498.013.144,00	4.834.550.677,00
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	47.776.800,00	47.176.000,00
		Program penempatan tenaga kerja	111.372.600,00	110.780.280,00
		Program hubungan industrial	256.354.608,00	247.156.196,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		833.355.000,00	793.603.000,00
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		833.355.000,00	793.603.000,00
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	153.173.000,00	151.817.000,00
		Program perlindungan perempuan	380.462.000,00	344.478.000,00
		Program pemenuhan hak anak (pha)	129.200.000,00	129.112.000,00
		Program perlindungan khusus anak	170.520.000,00	168.196.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		16.219.375.576,00	14.927.833.077,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		16.219.375.576,00	14.927.833.077,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.832.187.671,00	14.575.712.177,00
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	240.347.895,00	239.702.900,00
		Program penanganan kerawanan pangan	146.840.010,00	112.418.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		131.990.000,00	91.797.236,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,		131.990.000,00	91.797.236,00
	KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			
		Program penatagunaan tanah	131.990.000,00	91.797.236,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		6.214.247.870,00	6.179.225.207,00
16	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		6.214.247.870,00	6.179.225.207,00
		Program perencanaan lingkungan hidup	939.006.880,00	927.339.597,00
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	786.910.000,00	771.429.630,00
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	120.273.000,00	115.563.100,00
		Program pengelolaan persampahan	4.368.057.990,00	4.364.892.880,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.896.060.657,00	4.760.551.700,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.896.060.657,00	4.760.551.700,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.539.072.457,00	3.406.307.360,00
		Program pendaftaran penduduk	1.065.083.200,00	1.063.454.280,00
		Program pencatatan sipil	245.654.000,00	244.809.060,00
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	42.251.000,00	41.981.000,00
		Program pengelolaan profil kependudukan	4.000.000,00	4.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8.389.304.346,00	7.844.971.245,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8.389.304.346,00	7.844.971.245,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.292.266.346,00	5.767.710.355,00
		Program administrasi pemerintahan desa	824.558.000,00	824.491.500,00
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.272.480.000,00	1.252.769.390,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.717.755.000,00	7.640.048.998,00
19	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.717.755.000,00	7.640.048.998,00
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	7.717.755.000,00	7.640.048.998,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		15.529.104.468,00	14.491.183.449,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		15.529.104.468,00	14.491.183.449,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.985.597.468,00	7.993.052.805,00
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	840.047.000,00	818.199.380,00
		Program pengelolaan pelayaran	5.703.460.000,00	5.679.931.264,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		7.541.456.794,00	7.268.009.293,00
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		7.541.456.794,00	7.268.009.293,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.393.552.327,00	4.122.034.026,00
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	715.039.421,00	713.155.800,00
		Program pengelolaan aplikasi informatika	2.432.865.045,00	2.432.819.467,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		321.271.000,00	318.396.350,00
22	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		321.271.000,00	318.396.350,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	78.952.000,00	78.717.500,00
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	37.500.000,00	37.475.000,00
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	62.909.000,00	62.899.000,00
		Program pengembangan umkm	141.910.000,00	139.304.850,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.925.692.555,00	4.787.091.752,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		4.925.692.555,00	4.787.091.752,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.111.921.155,00	3.974.568.612,00
		Program pengembangan iklim penanaman modal	257.440.000,00	257.172.380,00
		Program promosi penanaman modal	80.960.000,00	80.942.880,00
		Program pelayanan penanaman modal	117.030.000,00	116.770.000,00
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	175.288.400,00	174.986.880,00
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	183.053.000,00	182.651.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2.930.030.000,00	2.815.080.706,00
24	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		2.930.030.000,00	2.815.080.706,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.634.936.000,00	2.565.577.626,00
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	295.094.000,00	249.503.080,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		176.066.000,00	167.162.105,00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		176.066.000,00	167.162.105,00
		Program penyelenggaraan statistik sektoral	176.066.000,00	167.162.105,00
		Urusan pemerintahan bidang persandian	207.020.000,00	205.237.380,00
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		207.020.000,00	205.237.380,00
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	207.020.000,00	205.237.380,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		483.962.000,00	483.720.460,00
27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		483.962.000,00	483.720.460,00
		Program pengembangan kebudayaan	483.962.000,00	483.720.460,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		4.453.258.679,00	4.314.147.884,00
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4.453.258.679,00	4.314.147.884,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.755.972.679,00	3.624.546.984,00
		Program pembinaan perpustakaan	697.285.999,00	689.600.900,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		57.000.976.866,00	56.015.823.378,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		20.595.980.358,00	20.365.912.255,00
29	DINAS PERIKANAN		20.595.980.358,00	20.365.912.255,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.893.802.253,00	6.773.890.100,00
		Program pengelolaan perikanan tangkap	9.898.314.105,00	9.810.970.210,00
		Program pengelolaan perikanan budidaya	2.208.945.000,00	2.198.015.765,00
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	297.000.000,00	296.132.000,00
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.297.919.000,00	1.286.904.180,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		10.106.139.215,00	9.852.666.170,00
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		10.106.139.215,00	9.852.666.170,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.129.101.215,00	8.922.570.337,00
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	403.285.000,00	402.308.580,00
		Program pemasaran pariwisata	348.587.000,00	344.932.473,00
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	225.166.000,00	182.854.780,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		17.689.502.493,00	17.579.632.589,50
31	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		17.689.502.493,00	17.579.632.589,50
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.276.163.000,00	2.261.939.500,00
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	12.035.456.642,00	11.955.799.559,50
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	187.122.500,00	184.510.000,00
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	2.909.144.900,00	2.899.652.580,00
		Program perizinan usaha pertanian	95.730.000,00	95.665.000,00
		Program penyuluhan pertanian	185.885.450,00	182.065.950,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		1.373.676.825,00	1.371.487.676,00
32	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		1.373.676.825,00	1.371.487.676,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	18.710.000,00	18.482.000,00
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	846.339.500,00	845.790.721,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	413.815.000,00	412.757.000,00
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	94.812.325,00	94.457.955,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		6.756.814.055,00	6.371.339.194,00
33	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		6.756.814.055,00	6.371.339.194,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.166.375.754,00	5.785.989.384,00
		Program perencanaan dan pembangunan industri	492.832.101,00	487.773.810,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	97.606.200,00	97.576.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		478.863.920,00	474.785.494,00
34	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		478.863.920,00	474.785.494,00
		Program perencanaan kawasan transmigrasi	33.440.026,00	33.117.080,00
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	267.546.001,00	264.597.758,00
		Program pengembangan kawasan transmigrasi	177.877.892,00	177.070.656,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		118.894.307.796,00	115.499.524.622,00
	SEKRETARIAT DAERAH		69.398.147.111,00	67.154.023.258,00
35	SEKRETARIAT DAERAH		69.398.147.111,00	67.154.023.258,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	59.090.737.764,00	57.227.452.045,00
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	8.459.103.247,00	8.294.971.463,00
		Program perekonomian dan pembangunan	1.848.306.100,00	1.631.599.750,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKRETARIAT DPRD		49.496.160.685,00	48.345.501.364,00
36	SEKRETARIAT DPRD		49.496.160.685,00	48.345.501.364,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	38.639.051.185,00	37.503.457.574,00
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	10.857.109.500,00	10.842.043.790,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		245.732.006.081,00	242.089.615.397,00
	PERENCANAAN		13.284.090.386,00	13.127.397.652,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		13.284.090.386,00	13.127.397.652,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.892.093.339,00	6.755.015.753,00
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4.020.140.880,00	4.011.613.252,00
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.371.856.167,00	2.360.768.647,00
	KEUANGAN		223.578.028.760,00	220.447.152.053,00
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		214.419.698.132,00	211.827.963.142,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.844.723.206,00	9.678.019.733,00
		Program pengelolaan keuangan daerah	201.391.506.426,00	201.012.350.052,00
		Program pengelolaan barang milik daerah	1.183.468.500,00	1.137.593.357,00
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH		9.158.330.628,00	8.619.188.911,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.321.535.128,00	7.830.833.064,00
		Program pengelolaan pendapatan daerah	836.795.500,00	788.355.847,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KEPEGAWAIAN		7.831.537.012,00	7.495.555.290,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		7.831.537.012,00	7.495.555.290,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.234.850.146,00	5.037.138.801,00
		Program kepegawaian daerah	2.596.686.866,00	2.458.416.489,00
		Pendidikan dan pelatihan	517.527.922,00	498.944.452,00
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		517.527.922,00	498.944.452,00
		Program pengembangan sumber daya manusia	517.527.922,00	498.944.452,00
		Penelitian dan pengembangan	520.822.000,00	520.565.950,00
42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		520.822.000,00	520.565.950,00
		Program penelitian dan pengembangan daerah	520.822.000,00	520.565.950,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		9.982.749.396,00	9.227.503.678,00
	INSPEKTORAT DAERAH		9.982.749.396,00	9.227.503.678,00
43	INSPEKTORAT DAERAH		9.982.749.396,00	9.227.503.678,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.214.832.696,00	6.471.485.678,00
		Program penyelenggaraan pengawasan	2.545.916.700,00	2.534.018.000,00
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	222.000.000,00	222.000.000,00
	UNSUR KEWILAYAHAN		46.224.886.488,00	43.663.079.773,00
	KECAMATAN		46.224.886.488,00	43.663.079.773,00
44	KECAMATAN TOJO		3.803.261.138,00	3.155.879.946,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.638.260.638,00	3.000.086.446,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	143.000,00	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	105.296.500,00	98.932.500,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	59.561.000,00	56.861.000,00
45	KECAMATAN TOJO BARAT		3.663.955.767,00	3.343.204.393,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.094.136.627,00	2.775.395.253,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	12.328.000,00	12.328.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95.719.200,00	95.709.200,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	52.120.000,00	52.120.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	390.011.940,00	388.011.940,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	19.640.000,00	19.640.000,00
46	KECAMATAN ULUBONGKA		2.793.096.823,00	2.607.925.125,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.484.751.823,00	2.337.362.125,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	55.200.000,00	18.450.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	13.170.000,00	12.970.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	35.900.000,00	35.868.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	204.075.000,00	203.275.000,00
47	KECAMATAN AMPANA KOTA		7.143.482.716,00	6.942.210.133,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.846.982.716,00	6.632.605.133,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	127.264.000,00	127.035.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	65.394.000,00	79.285.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	32.742.000,00	32.595.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	71.100.000,00	70.690.000,00
48	KELURAHAN AMPANA		429.680.000,00	408.719.241,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	190.300.000,00	170.094.241,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	239.380.000,00	238.625.000,00
49	KELURAHAN LABIABAE		436.050.000,00	394.134.905,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	230.850.000,00	188.937.405,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	205.200.000,00	205.197.500,00
50	KELURAHAN BAILO BARU		427.860.000,00	400.260.531,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	203.520.000,00	182.537.281,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	224.340.000,00	217.723.250,00
51	KELURAHAN BAILO		427.510.000,00	401.673.887,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	203.380.000,00	183.973.887,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	224.130.000,00	217.700.000,00
52	KELURAHAN BONERATO		433.600.000,00	409.152.320,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	153.535.000,00	142.610.520,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	280.065.000,00	266.541.800,00
53	KELURAHAN MALOTONG		418.700.000,00	384.512.620,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	115.880.000,00	105.612.620,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	302.820.000,00	278.900.000,00
54	KECAMATAN AMPANA TETE		2.918.168.035,00	2.795.292.072,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.557.982.035,00	2.462.780.572,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	11.040.000,00	7.145.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	110.886.000,00	98.587.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	27.000.000,00	27.000.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	211.260.000,00	199.779.500,00
55	KECAMATAN UNA-UNA		3.090.878.703,00	2.914.017.393,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.840.342.703,00	2.663.865.393,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	226.536.000,00	226.152.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	24.000.000,00	24.000.000,00
56	KECAMATAN TOGEAN		2.384.575.897,00	2.284.841.979,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.183.047.896,00	2.084.008.979,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	6.200.000,00	6.195.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	166.648.001,00	165.958.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	28.680.000,00	28.680.000,00
57	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN		2.461.210.868,00	2.348.462.019,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.176.936.868,00	2.064.231.519,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	245.999.000,00	245.963.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	26.100.000,00	26.100.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12.175.000,00	12.167.500,00
58	KECAMATAN WALEA BESAR		1.774.492.301,00	1.753.295.409,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.483.645.551,00	1.462.448.659,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	237.416.750,00	237.416.750,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	32.580.000,00	32.580.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20.850.000,00	20.850.000,00
59	KECAMATAN RATOLINDO		6.709.676.980,00	6.617.570.091,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.366.552.980,00	6.241.099.091,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	176.980.000,00	176.910.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	14.300.000,00	47.769.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	62.454.000,00	62.452.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	89.390.000,00	89.340.000,00
60	KELURAHAN UENTANAGA BAWAH		427.920.000,00	399.804.669,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	211.760.000,00	184.394.669,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	216.160.000,00	215.410.000,00
61	KELURAHAN UENTANAGA ATAS		443.200.000,00	376.602.316,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	219.370.000,00	172.782.316,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	223.830.000,00	203.820.000,00
62	KELURAHAN UEMALINGKU		485.200.000,00	465.589.222,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	223.960.000,00	208.349.222,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	261.240.000,00	257.240.000,00
63	KELURAHAN MUARA TOBA		425.940.000,00	391.467.779,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	258.131.000,00	231.658.779,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	167.809.000,00	159.809.000,00
64	KELUARAN DONDO BARAT		510.660.000,00	462.847.950,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	220.568.080,00	200.789.720,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	290.091.920,00	262.058.230,00
65	KELURAHAN DONDO		436.160.000,00	414.470.423,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	200.067.000,00	178.997.923,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	236.093.000,00	235.472.500,00
66	KECAMATAN TALATAKO		1.908.480.373,00	1.822.240.105,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.661.625.373,00	1.576.075.105,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	222.855.000,00	222.165.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	24.000.000,00	24.000.000,00
67	KECAMATAN BATUDAHA		2.271.126.887,00	2.168.905.245,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.970.864.887,00	1.869.013.245,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	162.732.000,00	162.362.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	27.000.000,00	27.000.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	110.530.000,00	110.530.000,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		51.655.338.976,00	49.428.673.769,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		51.655.338.976,00	49.428.673.769,00
68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		51.655.338.976,00	49.428.673.769,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.268.269.052,00	3.143.294.471,00
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.869.830.420,00	1.864.326.354,00
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	46.214.644.504,00	44.133.022.344,00
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	29.450.000,00	28.644.700,00
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71.895.000,00	71.235.000,00
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	201.250.000,00	188.150.900,00
	JUMLAH		1.437.708.835.973,00	1.377.190.655.956,31

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada intinya merupakan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai di daerah tersebut. Potensi permasalahan pembangunan daerah akan muncul jika kekuatan yang dimiliki daerah tersebut, belum dapat dikelola secara optimal, kelemahan tidak dapat diatasi dan tidak diminimalisir, peluang tidak dapat dimanfaatkan, dan ancaman tidak dapat diantisipasi dengan baik.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, pada periode Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antarakinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok (*main problem*), masalah (*problem*), dan akar masalah (*root of problem*).

Berdasarkan gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun 5 (lima) tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan wilayah daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kecamatan;
3. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah;
4. Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian);
5. Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una;

6. Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana alam dan nonalam;
7. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Secara sistematis uraian penyelesaian permasalahan daerah (masalah pokok, masalah, dan akar masalah) sesuai dengan prioritas visi misi Bupati/Wakil Bupati Tojo Una-Una dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan kecil anggota masyarakat yang hidup berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden), atau menetap pada kawasan pulau terpencil, pegunungan, atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan. KAT juga dipahami sebagai orang dalam jumlah tertentu yang terikat kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Beberapa kriteria KAT yang dimaksud antara lain: terbatasnya akses untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, masyarakatnya tertutup, homogen, hidupnya bergantung kepada sumber daya alam, tersisih di pedesaan dan perkotaan dan/atau tinggal di wilayah pulau-pulau terluar dan terpencil.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una selanjutnya dijabarkan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut.

Tabel 1.13
Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Masalah Pembangunan
Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan Daratan,
terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan dan	• Jumlah penduduk miskin masih	Sulitnya Kondisi geografis menyebabkan terbatasnya jangkauan, khususnya terhadap

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
daratan, terutama pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	tinggi sebesar 25.430 jiwa; Persentase penduduk miskin kabupaten Tojo Una-Una masih sangat hingga tahun 2020 sebesar 16,39 persen. Tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Tengah.	wilayah kepulauan dan pegunungan
		Masih adanya budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang sulit menerima perubahan (kemajuan dan teknologi)
		Adanya sebagian masyarakat miskin hidup di wilayah hutan dan wilayah pesisir yang tidak memiliki aset tanah dan bangunan layak huni
		Masih tingginya harga-harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan dan daratan terpencil, termasuk wilayah KAT
		Belum dapat dikendalikan harga-harga kebutuhan pokok (tidak stabil) disebabkan biaya produksi dan distribusi ke wilayah pegunungan dan pulau-pulau masih tinggi
	Pendapatan per kapita masyarakat rendah hanya sebesar 28,04 Juta pada Tahun 2020	Rendahnya produktivitas kerja dan etos kerja masyarakat Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja
		Belum optimalnya pengelolaan dan Perkembangan Sektor Industri, perdagangan, dan bisnis
		Belum optimalnya Sektor unggulan daerah yakni Pariwisata, Pertanian, dan Perikanan kelautan dikelola untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Program bantuan pemerintah untuk penduduk miskin belum tepat sasaran	Belum optimalnya melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data penduduk miskin/penerima bantuan
		Belum digunakan secara baik dan tepat hasil monitoring dan evaluasi distribusi bantuan kepada penduduk miskin
	Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin belum memadai	Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas Kesehatan masyarakatmiskin
		Terbatasnya sarana dan prasarana publik yang dapat diakses oleh masyarakat miskin
		Terbatasnya akses informasi tentang lapangan pekerjaan dan peluang usaha (ekonomi)
		Tatalaksana dan pola pikir yang belum berorientasi pada <i>good andclean governance</i>
		Belum optimalnya inovasi birokrasi yang dijalankan
	Kualitas layanan publik masih rendah	Adanya struktur organisasi yang belum menerapkan pembagian kerja secara profesional dan berbasis kinerja
		Adanya SDM aparatur yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberikan pelayanan optimal

Sumber data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

2. Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah Kecamatan

Aksesibilitas (ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain, aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi (*transportation system*). Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan (mobilitas) antar tempat atau antar kawasan.

Tabel 1.14
Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan
Pembangunan Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya
infrastruktur antara wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan	- Pengembangan wilayah belum merata antar Kecamatan dan antar Desa, dimana panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 255.930 meter atau baru mencapai 22,5 persen dari panjang jalan Seluruh 1.150.139 meter. - Rumah tinggal bersanitasi sebesar 56,40 persen Tahun 2020 berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah	Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Tojo Una-Una untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara merata
		Belum optimal dilakukan Langkah-langkah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program antar OPD yang menangani infrastruktur dengan OPD lain
		Belum dilaksanakan dengan baik pelaksanaan identifikasi dan prioritas pengembangan wilayah Masih terbatasnya pembiayaan Infrastruktur sebagai satu kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah melalui pemanfaatan alokasi dana Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	• Ketimpangan Infrastruktur menyangkut rumah tinggal berakses air minum layak mencapai 91,14 persen pada Tahun 2020. Masih ada 8,86 persen RT yang belum terakses Air minum layak.	Belum meratanya kemampuan ekonomi antara wilayah disebabkan infrastruktur pendukung belum Memadai Lemahnya kapasitas masyarakat di perdesaan Belum tersediannya layanan air bersih di wilayah-wilayah kepulauan Belum meratanya akses terhadap komunikasi (khususnya jaringan internet dan sejenisnya)

Sumber data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

3. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja (*key performance*) adalah kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas SDM antara lain, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian, namun juga dalam mendukung pembangunan secara luas. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, *pertama*, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dunia industri (DUDI). Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting dan strategis dalam

penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEKS yang lebih merata. *Kedua* adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian (*character building*). *Ketiga*, adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, peningkatan kompetensi, dan pembinaan lain-lain.

Tabel 1.15
Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan
Pembangunan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) masih rendah
Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah	• Capaian IPM Kabupaten Tojo Una-una dengan nilai IPM 64,59 Tahun 2020 masih berada pada posisi terendah	Masih rendahnya angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Masih rendahnya angka harapan lama sekolah. Masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat masih tergolong rendah rata-rata 28,04 Juta.
	• Rata-rata lama sekolah masih rendah sebesar 8,39 pada Tahun 2020	Belum memadainya sarana dan prasarana sekolah terutama wilayah - wilayah terpencil
		Belum tercukupinya jumlah dan kualifikasi guru yang sesuai standar
		Belum meratanya distribusi guru di seluruh wilayah kecamatan, terutama di wilayah kepulauan dan daratan yang terpencil
	• Masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS) meningkat namun baru mencapai 12,55 Tahun 2020	Belum optimalnya pelaksanaan program paket A, B, C untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pendidikan Masih mahal biaya pendidikan dan akses terhadap perguruan tinggi setara diploma dan strata satu Masih tingginya angka putus sekolah (APTS) terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Usia Harapan Hidup (UHH) masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 65,67 Tahun 2020	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS (pola hidup bersih dan sehat) Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan, terutama pada wilayah kepulauan dan daratan yang terpencil dan sulit dijangkau Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan), sehingga alokasi biaya kesehatan masih rendah Masih tingginya angka kesakitan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah KAT

Sumber data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

4. Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian)

Pertumbuhan ekonomi daerah (*regional economic growth*) pada dasarnya dipengaruhi keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penetapan suatu sektor komoditas sebagai sektor unggulan daerah harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Sektor unggulan Kabupaten Tojo Una-Una yakni Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata.

Tabel 1.16
Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan
Pembangunan Pemanfaatan trisula pembangunan belum

**optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian)
Kabupaten Tojo Una-Una**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian)	Masih rendahnya kontribusi Sektor Pariwisata masih rendah hanya sebesar 10,95 persen Tahun 2020	Belum dikelola potensi Sektor Pariwisata secara optimal dan profesional
		Belum tertatanya dengan baik destinasi pariwisata yang mencakup aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata
		Belum dikembangkan kelembagaan dan industri pariwisata secara optimal
		Masih bersifat tradisional (konvensional) pengelolaan pemasaran pariwisata
		Masih sangat terbatasnya atraksi dan event wisata untuk menarik minat wisatawan
		Terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi turis mancanegara dan domestik yang menurunkan arus kunjungan wisatawan ke Tojo Una-Una kurun waktu Tahun 2019-2020
		Belum terintegrasinya pengelolaan Sektor Pariwisata dengan sektor lainnya dan antar OPD yang terkait pariwisata
		Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata khususnya pulau-pulau (jaringan internet, listrik, air bersih)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Makin menurun dan rendahnya pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian yakni sebesar 38,68 persen Tahun 2020	Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan rendahnya kesejahteraan petani, karena nilai yang diterima dibandingkan nilai yang dibayarkan
		Terbatasnya akses dan informasi pasar
		Masih panjangnya rantai nilai hasil-hasil Sektor Pertanian
		Masih rendahnya teknologi pengolahan hasil pertanian sehingga memberikan <i>value added</i> yang rendah
		Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian, termasuk rendahnya akses terhadap bantuan permodalan dan usaha Sektor Pertanian
	Sektor Perikanan (Kelautan) belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal	Belum adanya industri pengolahan hasil perikanan
		Masih terbatasnya informasi dan akses pasar hasil perikanan (kelautan)
		Masih rendahnya SDM di Sektor perikanan/kelautan termasuk belum memadainya sarana (peralatan) yang dimiliki nelayan tradisional

Sumber Data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

5. Kemampuan Fiskal Yang Rendah Dalam Membiayai Upaya Percepatan pembangunan Di Kabupaten Tojo Una-Una

Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) adalah kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui

pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah ini menjadi unsur untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Dimana, peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah dihitung dengan formula pendapatan dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan yang dimaksud untuk daerah provinsi meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Intinya, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Tabel 1.17
Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan
Pembangunan Kemampuan Fiskal Yang Rendah Dalam
Membiayai Upaya Percepatan Pembangunan
Di Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una- Una	Masih rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,34 persen terhadap total pendapatan daerah Tahun 2020	Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi asli daerah yang belum tergali
		Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
		Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah
		Kurangnya peran dan kontribusi perusahaan daerah (BUMD) sebagai sumber penghasil pendapatan daerah
		Belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belanja daerah belum efisien dan efektif	Belum tepatnya dan konsistennya belanja daerah dalam membiayai Program-Program Prioritas Daerah Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Belum optimalnya pemanfaatan belanja karena masihnya adanya SILPA yang besar

Sumber Data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

6. Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana alam dan non alam

Lingkungan hidup (*enviroment*) merupakan satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, lingkungan hidup perlahan mengalami degradasi. Degradasi tersebut menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Degradasi lingkungan hidup (*enviromental degradation*) adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Terjadinya degradasi lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah serius dan berbahaya yang dapat ditimbulkan antara lain, bencana alam, perubahan iklim secara drastis, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan. Selain bencana alam, tentu bencana non-alam juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Tabel 1.18

Identifikasi dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Degradasi Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Resiko Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya resiko bencana alam dan nonalam	Adanya perubahan penggunaan lahan (alih fungsi lahan) yang terjadi	Meningkatnya aktivitas masyarakat di dalam pemanfaatan lahan dan pembukaan lahan baru

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penerapan tata kelola dan kelembagaan lahan
		Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya
		Tingginya alih fungsi lahan dan adanya kasus penebangan liar hutan sehingga mengganggu daerah resapan air (<i>catchmen area</i>) yang dapat memicu bahaya banjir bandang
		Adanya perubahan iklim yang meningkatkan curah hujan dan suhu udara yang juga ikut berimbas terhadap wilayah Kabupaten Tojo Una-Una
		Belum terlaksananya reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung lingkungan yang berkelanjutan
	• Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dalam mendukung dan membantu upaya-upaya konservasi (misalnya adanya pengeboman ikan yang merusak terumbu karang khususnya di wilayah kepulauan)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan dan upaya tampung limbah (<i>assimilative capacity</i>)
		Belum optimalnya tata kelola dan manajemen pengelolaan persampahan
		Adanya aktivitas pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan
	• Belum optimalnya mitigasi manajemen risiko bencana	Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mitigasi dan manajemen risiko kebencanaan
		Belum optimalnya mobilisasi dan penggunaan sumberdaya
		Faktor geomorfologi Kabupaten Tojo Una-Una berbentuk perbukitan yang mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring serta perbukitan struktural lipatan yang memiliki pola-pola struktur lipatan dan banyaknya aliran sungai yang melewati wilayah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan bencana banjir dan tanah longsor ditengah meningkatnya curah hujan. Jenis bentanglahan tersebut

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		mempengaruhi tata aliran air di bagian hulu yang mempengaruhi pencegahan banjir
		Masih rendahnya kompetensi, kehandalan, dan kualitas SDM penanganan bencana
		Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana
		Belum terbentuknya desa tangguh bencana secara merata

Sumber Data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

7. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Barang, jasa dan pelayanan administratif bukanlah barang yang dapat diperdagangkan sehari-hari, tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan pemerintah. Sehingga, pelayanan publik dapat dipahami sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat penyelenggara pemerintahan. Keberadaan pemerintah daerah tentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, pemerintah daerah (birokrat/aparatur) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, tetapi berbagai kebutuhan

yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Tabel 1.19
Identifikasi Dan Pemetaan Rumusan Permasalahan Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik Di Kabupaten Tojo Una-Una

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik	Masih rendahnya kinerja aparatur daerah dimana Nilai Sakip Kabupaten Tojo Una-Una dan Perangkat Daerah baru mencapai CC Tahun 2020	Rendahnya kualitas SDM aparatur
		Tata laksana dan pola pikir yang belum berorientasi pada <i>good and clean governance</i>
		Belum optimalnya inovasi birokrasi masih belum optimal
		Masih rendahnya capaian kinerja pembangunan, karena capaian indikator belum sesuai dengan target kinerja
		Masih sangat terbatasnya ketersediaan data dan informasi pembangunan
	- Kualitas layanan publik masih rendah berdasarkan Hasil evaluasi kinerja OPD Tahun 2020. - Hasil evaluasi kinerja OPD 2020 kedalam kuadran-kuadran. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 20 OPD yang masuk kuadran 1	Terdapatnya hanya beberapa OPD yang menjalankan kinerja secara efektif dan efisien khususnya yang masuk dalam kelompok kuadran 4, 5 dan 6 sementara sebagian besar belum efektif didalam optimalisasi belanja dan target kinerja yang diberikan.
		Struktur organisasi yang belum menerapkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	(tidak efektif dan tidak efisien). Kemudian 7(tujuh) atau 17,07% OPD kuadran 2, Kuadran sebanyak 4 OPD (9,76%) pada kuadran 4 dan kuadran 5 sebanyak 2 OPD (efektif dan efisien) dan pada kuadran sebanyak 3 OPD (Juga Efektif tapi Kurang Efisien)	pembagian kerja secara profesional Kualitas SDM aparatur belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan

Sumber Data : Dokumen RPJMD Tojo Una-Una 2021-2026

b. Visi Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 merupakan gambaran kondisi Kabupaten Tojo Una-Una periode kepemimpinan Bupati Muhammad Lahay, SE, MM dengan wakil Bupati Ilham Lawidu, SH dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD. Implementasi tentang visi misi secara lebih aplikatif dituangkan ke tujuan, sasaran, dan indikator-indikator yang ingin dicapai di akhir periode, melalui berbagai strategi dan arah kebijakan dengan berpedoman dan merujuk pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami penguatan, pendalaman dan penajaman dengan mempertimbangkan dan mensinkronisasikan pada berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan untuk dapat diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan sesuai misi yang diemban. Visi tersebut menjadi visi Kabupaten Tojo Una-Una yang dicapai pada akhir periode perencanaan

Tahun 2026, juga untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Visi Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una ini diharapkan mampu mengejawantahkan dan memenuhi amanah masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, sekaligus beriringan dengan pencapaian tujuan nasional di daerah, sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, dengan konsisten dan terpadu memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RPJPD Kabupaten. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)**

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan sosial, budaya, ekonomi maupun bencana. Berbagai hal tersebut menjadi modal dasar menuju wilayah yang maju dan keluar dari ketertinggalan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (society welfare) yang berkeadilan, serta terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi tersebut dengan spirit (jargon) adalah GAPAI TAMARA.

TAMARA adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan semangat dan motivasi kebaikan bersama di semua komponen dan elemen masyarakat, dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara sinergi, terpadu, dan harmonis. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan (rujukan) untuk menjabarkan misi pembangunan daerah. Pokok-pokok visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.20
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

No.	Pokok Visi	Penjelasan
1	TANGGUH	- Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una membangun masyarakat Tojo Una-Una yang Tangguh, dimana masyarakat berpikir positif dan optimis dalam meraih masa depan, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Tojo Una-Una yang Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA). - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam meraih kemajuan di semua bidang pembangunan itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Tojo Una-Una tidak sekedar Maju dan Sejahtera, tetapi juga Tangguh menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara Bersama. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menyiapkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi krisis, yakni bencana alam dan non-alam termasuk pandemi Covid-19, serta perubahan iklim (<i>climate change</i>) yang sulit diprediksi namun dengan adanya mitigasi dan antisipasi yang baik maka masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una mampu menghadapinya. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga memaknai Ketangguhan Berkelanjutan, adanya roda pemerintahan daerah yang berkesinambungan dan melanjutkan kinerja-kinerja positif yang sudah dicapai, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis pembangunan daerah. - Pemerintah Daerah dan Masyarakat Tojo Una-Una sebagai satu kesatuan yang terikat secara sosial, budaya dan ekonomi. Dimana, adanya akar budaya yang hidup masyarakat setempat (<i>local wisdom</i>) berada dalam ikatan sosial (<i>social-capital</i>), memiliki keterkaitan saling membantu, dan

No.	Pokok Visi	Penjelasan
		bekerjasama dalam melahirkan ketangguhan masyarakat (<i>social-resilience</i>). Ketangguhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una merupakan suatu kapasitas dan kapabilitas yang berkelanjutan dalam suatu masyarakat, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, serta cepat dalam pemulihan menghadapi bencana alam dan nonalam. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam membangun ketangguhan masyarakat sebagai strategi kesiapsiagaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu perspektif, ketangguhan masyarakat memiliki potensi untuk mengatasi masalah umum dan khusus. Perspektif ini membingkai kegiatan sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Ketangguhan masyarakat menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kesiapsiagaan darurat dan upaya pemulihan secara cepat baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun pembangunan ekonomi daerah. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memaknai Tangguh juga dalam melaksanakan pembangunan bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan membangun dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan dan Kabupaten Tertinggal, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (<i>economic development</i>), pembangunan sosial (<i>social development</i>), dan perlindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).
2	MAJU	Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memaknai dan memahami Maju dalam pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan

No.	Pokok Visi	Penjelasan
		potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki dan ingin dicapai adalah Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang lebih maju dalam semua bidang sehingga terantaskan dari posisi salah satu kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah dan berkurangnya angka kemiskinan secara signifikan. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga mengartikan Maju, sebagai Gerakan pembangunan untuk menjadi lebih baik (lebih terdepan), atau telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Pemerintah menetapkan target untuk mencapai Kabupaten Tojo Una-Una dengan standar hidup (<i>living standard</i>) yang lebih baik (kesejahteraan tinggi) dibanding kondisi sebelumnya di wilayah daratan maupun Kepulauan secara merata. Indikator kemajuan dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dan terpenuhinya kebutuhan dasar, kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. - Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mewujudkan Maju yang ditandai hadirnya pelayanan publik (<i>public services</i>) yang maju dan mampu melayani kebutuhan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Maju juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkembang dan keluar dari ketertinggalan daerah (kabupaten tertinggal).
3	SEJAHTERA	Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan pembangunan daerah berorientasi pada kemandirian ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan

No.	Pokok Visi	Penjelasan
		Kesejahteraan Masyarakat yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una akan mengembangkan dan mengelola trisula sektor unggulan daerah (Pertanian, Perikanan/ Kelautan, Pariwisata) sehingga berdampak pada meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen mewujudkan daerah Tojo Una-Una, khususnya Pulau Togean sebagai kawasan destinasi pariwisata nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan melalui pengembangan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi dan ketahanan pangan (<i>food security</i>). • Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, menekan Sejahtera dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (<i>economy inclusive</i>), meningkatkan pendapatan perkapita yang meningkat dan terus bertumbuh (<i>income generate</i>), memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan petani (<i>farmer welfare</i>) dan nelayan (<i>fishermen welfare</i>), peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Sumber: Dokumen RPJMD 2021-2026

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan visi diuraikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai, dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun dan dimaknai untuk memberikan kerangka logis (*logical framework*) bagi tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan peta jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut.

Misi memuat langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan Visi. Dalam implementasinya, sebuah pernyataan misi merupakan hasil kompromi interpretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk (garis besar) cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju, serta memberikan arah bagaimana cara bekerja, sehingga memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pernyataan misi harus sederhana, ringkas dan mudah dipahami, tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Rumusan misi yang baik dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai serta menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi memiliki urgensi dalam meletakkan kerangka berfikir dan bertindak melalui tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, serta peta jalan yang akan dilalui. Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi, dan dinamika di Kabupaten Tojo Una-Una, dan sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una: Mohammad Lahay, S.E., M.M. dan Ilham Lawidu, S.H. Dokumen RPJMD merupakan hasil penelaan terhadap misi kepala daerah dan makna, serta implikasi bagi perencanaan pembangunan, menerjemahkan ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan,

maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yaitu:

Gambar 1.2
Misi RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026



a. Misi 1 : Touna Tangguh. Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan Berkelanjutan.

Misi ini mengandung makna sebagai upaya sistimatis, terukur, dan terencana di dalam mengentaskan kemiskinan dengan tetap menerapkan *triple track strategy*, yakni strategi pembangunan yang *pro-poor* (mengatasi kemiskinan), *pro-job* (penciptaan lapangan kerja), dan pembangunan yang *pro-environment* untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana. Strategi ini sebagai afirmasi atau keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*), belum mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, karena masyarakat miskin berhak untuk terpenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana warga negara lainnya. Misi ini juga mengandung makna komitmen dan konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan dan kepulauan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam daerah, dengan memperhatikan kehidupan generasi mendatang. Juga mewujudkan masyarakat yang tangguh

dan memiliki daya tahan terhadap bencana baik alam maupun non alam. Dimana Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah rawan bencana, karena dilintasi sesar aktif dan keberadaan gunung berapi vulkanik (Gunung Colo), gelombang laut, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Untuk itu pemerintah daerah menyadari perlunya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, karena masyarakat sebagian besar bermata pencaharian dan hidup di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat mempersiapkan diri, sehingga diharapkan memiliki kesadaran dan kepekaan untuk mampu mengantisipasi dan mengurangi ancaman bencana dan korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur. Selain itu, adanya ancaman bencana non alam antara lain pandemi Virus Covid-19 saat ini, menuntut masyarakat untuk mampu hidup berdampingan dengan virus dengan menerapkan budaya hidup sehat dan standar protokol kesehatan. Pendekatan dan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kesadaran ini sebagai upaya yang lebih sistematis dan terpadu dalam memandang bencana sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, namun membangun kemampuan untuk selalu antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian. Kemampuan ini bermakna kesiapan menghadapi dan kesanggupan untuk pulih dengan kondisi yang lebih baik (*build back better*) pasca bencana. Kemampuan ini disebut masyarakat tangguh bencana.

b. Misi 2 : Touna Maju. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal.

Pengembangan wilayah (regional development) melalui percepatan pembangunan infrastruktur, merupakan upaya memacu keluar dari ketertinggalan daerah, mengatasi kesulitan aksesibilitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan antar wilayah daratan maupun kepulauan. Kebijakan pengembangan wilayah sangat ditentukan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang sangat berbeda, antara suatu wilayah

dengan wilayah lainnya, sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu harus disesuaikan dengan realitas, potensi dan isu permasalahan di masing-masing wilayah tersebut. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas 5721,51 km² terdiri atas 12 kecamatan yang terbagi menjadi dua kategori yaitu wilayah daratan 6 kecamatan, dan kepulauan 6 kecamatan. Sistem konektivitas antar wilayah ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur transportasi laut, untuk kecamatan di wilayah kepulauan dan untuk membuka keterisolasian untuk wilayah daratan dengan karakteristik topografi wilayah, umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan landai menjadi prioritas untuk dapat keluar dari kabupaten tertinggal. Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar, dan penataan Kota Ampana sebagai ibukota kabupaten, untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitasi aksesibilitas destinasi wisata melalui pembangunan infrastruktur yang memadai baik di wilayah darat maupun gugusan Kepulauan Togean. Fokus pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, perikanan/kelautan dan pariwisata menjadi prioritas utama pembangunan.

c. Misi 3 : Touna Sejahtera. Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata yang Berkelanjutan.

Misi ini mengandung makna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*quality of pro-growth*) dan berkelanjutan bertumpu pada sektor unggulan daerah (trisula pembangunan) yaitu Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata. Sektor Pertanian digerakan melalui peningkatan nilai tambah berbasis bisnis dan industri (agrobisnis dan agroindustri) yang maju, dan mampu mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat, sehingga petani dapat sejahtera (*farmer welfare*), menggerakkan sektor perikanan dan kelautan yang maju dan mendorong peningkatan taraf perekonomian nelayan lebih sejahtera (*fishermen welfare*), serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Kepulauan Togean sebagai kawasan destinasi pariwisata nasional yang dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai usaha nyata meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan-Kelautan untuk menguatkan ketahanan pangan lokal, meningkatkan kontribusi komoditas pertanian unggulan sebagai basis bahan baku industri, untuk penyangga bagi wilayah-wilayah utama pusat pertumbuhan, menjalin kerjasama kemitraan (*partnership*) yang saling menguntungkan dengan pelaku-pelaku usaha industrial (investor) guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, permodalan dan pemasaran, mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan, meningkatkan peran masyarakat pariwisata dan *stakeholders* sadar wisata untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas pariwisata, dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, dengan mengoptimalkan semua potensi pendapatan dari pengembangan sektor unggulan daerah tersebut.

d. Misi 4 : Touna Berdaya Saing. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkeadilan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menghadapi kendala dan masalah dalam pembangunan daerah, adalah rendahnya akses masyarakat ke pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pemerintah daerah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang berkualitas, untuk dapat menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing (*competitiveness*). Mewujudkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar mutu pendidikan, mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan keluarga, mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pelayanan pendidikan dan kesehatan, antara wilayah daratan dan kepulauan sehingga upaya penanggulangan

kemiskinan terintegrasi dan berkelanjutan berbasis pendidikan dan kesehatan dapat tercapai. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga. Langkah-langkah strategis dalam memperbaiki sektor kesehatan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melalui antara lain: aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan baik di wilayah daratan maupun di kepulauan. Upaya-upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tojo Una-Una tersebut diharapkan bermuara dan akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas modal manusia yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

e. Misi 5: Touna Smart. Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diemban berdasarkan undang-undang otonomi daerah, merancang dan melaksanakan pelayanan publik, sejalan dengan regulasi terhadap masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Tojo Una-Una. Konsep dan pendekatan *smart governance*, dipilih sebagai strategi pelayanan yang lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan (*konsep kota/kabupaten madani*). Pemerintahan daerah yang cerdas adalah pemerintah yang dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan mengurangi kendala, atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi

bagian dalam mendukung implementasi pendekatan *smart governance*, sehingga pemerintahan bersifat inklusif dengan kondisi daerah setempat. Adanya prakarsa, inovasi dan kreativitas pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta, untuk menciptakan kerjasama yang harmonis dan sinergi untuk membangun kelembagaan pemerintah daerah yang handal, profesional, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik (*public services oriented*) dari pemerintah kabupaten hingga desa. Pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat, serta media massa, adalah lima pilar utama (*pentahelix*) dalam mengimplementasikan konsep dan pendekatan *smart governance*. Aparatur birokrasi sebagai organisasi formal pemerintah daerah memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan regulasi, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang didalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan, harus didukung seluruh pemangku kepentingan lainnya. *Smart governance* merupakan indikator penting bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. Implementasi *smart governance*, mensyaratkan adalah adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan adanya inovasi pembangunan yang diinisiasi perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Rumusan arah kebijakan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan serta berbagai kewenangan yang menjadi tanggungjawab daerah kabupaten dan penjabaran dari tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan arah kebijakan terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.21
Uraian Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

TUJUAN				SASARAN			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
MISI PERTAMA: Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan							
1.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat	1.1.1	Angka Kemiskinan	1.1.1.1	Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat	1.1.1.1.1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
						1.1.1.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan
						1.1.1.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan
						1.1.1.1.4	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
						1.1.1.1.5	Pendapatan perkapita
				1.1.1.2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan	1.1.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
						1.1.1.2.2	Indeks Gini Rasio
				1.1.1.3	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1.1.1.3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)
						1.1.1.3.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	1.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.2.1.1	Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	1.2.1.1.1	Indeks kualitas Air (IKA)
						1.2.1.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)
						1.2.1.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
						1.2.1.1.4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
				1.2.1.2	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan	1.2.1.2.1	Cakupan pelayanan persampahan

TUJUAN				SASARAN			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
					lingkungan Kota Ampana		
				1.2.1.3	Meningkatnya respons dan layanan kebakaran kabupaten	1.2.1.3.1	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten
				1.2.1.4	Meningkatnya ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	1.2.1.4.1	Indeks risiko bencana daerah
						1.2.1.4.2	Persentase desa tangguh bencana
MISI KEDUA: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal							
2.1	Mempercepat pemerataan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah untuk keluar dari kabupaten tertinggal	2.1.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2.1.1.1	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	2.1.1.1.1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik
				2.1.1.2	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	2.1.1.2.1	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun
				2.1.1.3	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan dan keselamatan transportasi	2.1.1.3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan
				2.1.1.5	Menurunnya Desa <i>Blankspot</i> koneksi internet	2.1.1.5.1	Persentase koneksi internet desa
				2.1.1.6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.1.1.6.1	Persentase Rumah Layak Huni
				2.1.1.7	Meningkatnya ketersediaan air bersih	2.1.1.7.1	Persentase ketersediaan air minum layak
MISI KETIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-Kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan							
3.1	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas bertumpu pada trisula sektor unggulan daerah	3.1.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	3.1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	3.1.1.1.1	Pertumbuhan ekonomi
				3.1.1.2	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam memajukan daerah	3.1.1.2.1	Realisasi investasi daerah sektor unggulan
						3.1.1.2.2	Nilai kontribusi sektor pertanian dalam PDRB
						3.1.1.2.3	Nilai kontribusi sektor perikanan-kelautan dalam PDRB
						3.1.1.2.4	Nilai kontribusi sektor pariwisata

TUJUAN				SASARAN			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
				3.1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3.1.1.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkeadilan							
4.1	Meningkatkan sumber daya manusia Tojo Una-Una yang unggul dan berdaya saing	4.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4.1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4.1.1.1.1	Indeks Pendidikan
						4.1.1.1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
						4.1.1.1.3	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				4.1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1.2.1	Indeks Kesehatan
						4.1.1.2.2	Usia Harapan Hidup (UHH)
						4.1.1.2.3	Angka <i>Stunting</i>
				4.1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan	4.1.1.3.1	Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat provinsi
				4.1.1.4	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	4.1.1.4.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance							
5.1	Terselenggarakan pelayanan publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada inovasi	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	5.1.1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	5.1.1.1.1	Indek Kepuasan Pelayanan Publik
				5.1.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	5.1.1.2.1	Nilai SAKIP Daerah
				5.1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK
				5.1.1.4	Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan desa	5.1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tojo Una-Una
						5.1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju

Sumber: Dokumen RPJMD 2021-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan

pembangunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2005-2025.

Analisis terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una bertujuan untuk merencanakan pembangunan lima tahunan ke IV dengan jangka waktu 2020-2025. Adapun Amanat skala prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditunjukkan untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan **terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.**
2. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum, **terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat.** Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, **terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.**
3. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,

meningkatkan kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.

Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema, atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan periode Tahun 2021-2026 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.3

Fokus Pembangunan Lima Tahunan Periode Tahun 2021-2026



Prioritas pembangunan yang ditetapkan pada gambar di atas walaupun berbeda pada setiap periodenya namun memiliki

kesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran tahapan lima tahun dalam RPJMD Tahun 2021-2026

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah secara minimal yang berhak diperoleh setiap warganya. Pada Ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah guna mengukur kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengadakannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing Unit Kerja. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja dari SKPD.

Untuk lebih jelaskan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tojo Una-Una, telah dijabarkan lebih rinci pada BAB IV Laporan ini.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,47	69,04	0,57 Poin
2	Angka Kemiskinan	16,74	16,36	-0,38%
3	Angka Pengangguran	2,83	2,47	-0,36%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,37	3,69	0,32%
5	Pendapatan (Juta Rupiah) Perkapita	40,31	43,05	2,74 Juta
6	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	0,262	0,244	-0,018 Poin

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan data kinerja makro Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya tren positif berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,47 pada tahun 2023 menjadi 69,04 pada tahun 2024 meningkat 0,57 Poin. Tren ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 16,74% menjadi 16,36% (0.38%), yang mengindikasikan keberhasilan pemerintahan daerah dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, angka pengangguran mengalami penurunan dari 2,83% menjadi 2,47% (turun 0,36%) menunjukkan adanya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di bandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang meningkat dari 3,37% menjadi 3,69% (naik 0,32%) menandakan adanya ekspansi sektor

ekonomi yang lebih kuat, di dukung oleh peningkatan investasi dan produktifitas daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dalam pendapatan per kapita, yang mengalami kenaikan signifikan dari Rp. 40.310.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.740.000,00. Ini mencerminkan daya beli yang semakin membaik serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, ketimpangan pendapatan (rasio gini) menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 0,262 menjadi 0,244 (turun 0,018 poin). Hal ini menandakan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sehingga kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat semakin berkurang. Secara keseluruhan, tren peningkatan dalam berbagai indikator ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Namun, tantangan tetap ada dalam mempertahankan tren positif ini agar tetap berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlampir pada halaman 74 s.d 105

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

2.3.4 Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, dan

2.3.6 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Terlampir pada halaman 106 s.d 158

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaporan kinerja yang sebagaimana termuat dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tersebut dikategorikan berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 Bupati Tojo Una-Una pada sasaran yang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun penjelasan dan gambaran uraian pencapaian dapat dilihat secara spesifik perbandingan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, perbandingan antara realisasi kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dengan tahun 2023 serta beberapa tahun terakhir (berdasarkan periode RPJMD), perbandingan antara realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dengan target jangka menengah (berdasarkan periode RPJMD), membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar/capaian nasional serta standar/capaian kabupaten/kota tetangga, menganalisis keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dan menganalisis program/kegiatan menunjang keberhasilan/kegagalan.

Berdasarkan pada hal sistematisa tersebut bahwa dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja adalah tujuan spesifik dan terukur yang harus dicapai dalam suatu periode waktu tertentu, dan merupakan bagian penting dari perjanjian kinerja yang disepakati antara individu atau tim dengan organisasi. Target ini menjadi dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	15,10%
		Gini Ratio	0,300
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75
3.	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	45
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5%
5.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,89
		b. Angka Stunting	15,18

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	94,02
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61
		b. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	80
		c. Nilai SAKIP Daerah	71

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	15,10%	16,36	92,30
2.	Gini Ratio	0,300	NA	NA

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,00	83,62	111,49

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	45	NA	NA

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5%	NA	NA

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,89	66,97	100,12
2.	Angka Stunting	15,18	7,60	199,74

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	94,02	NA	NA

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61	73,89	121,13
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	80	88,68	110,85
3.	Nilai SAKIP Daerah	71	61,67	86,86

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kemiskinan	16,39	16,12	16,74	16,36
2.	Gini Ratio	0,250	0,247	0,250	NA

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan					
No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,05	79,44	83,62	83,62

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah					
No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	55,57	60,33	61,15	NA

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	4,25	3,46	3,34	NA

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,81	67,62	68,47	66,97
2.	Angka Stunting	19,02	17,34	10,17	7,60

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,69	55,21	54,39	NA

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024

1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	50,92	52,23	65,76	73,89
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	89,20	91,40	81,36	88,68
3.	Nilai SAKIP Daerah	58,47	60,29	61,53	61,67

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat									
No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Angka Kemiskinan	16,60	16,39	16,00	16,12	15,10	16,74	14,10	16,36
2.	Gini Ratio	0,300	0,250	0,300	0,247	0,300	0,250	0,300	NA

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan									
No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	63,05	75,00	79,44	80,00	83,62	80,00	83,62

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah									
No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	35,00	55,57	40,00	60,33	45,00	61,15	50,00	NA

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	3,00	4,25	5,00	3,46	5,00	3,34	7,00	NA

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,74	66,81	66,04	67,62	66,89	68,47	67,74	66,97
2.	Angka Stunting	20,18	19,02	17,68	17,34	15,18	10,17	12,68	7,60

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,92		92,62		93,32		94,02	NA

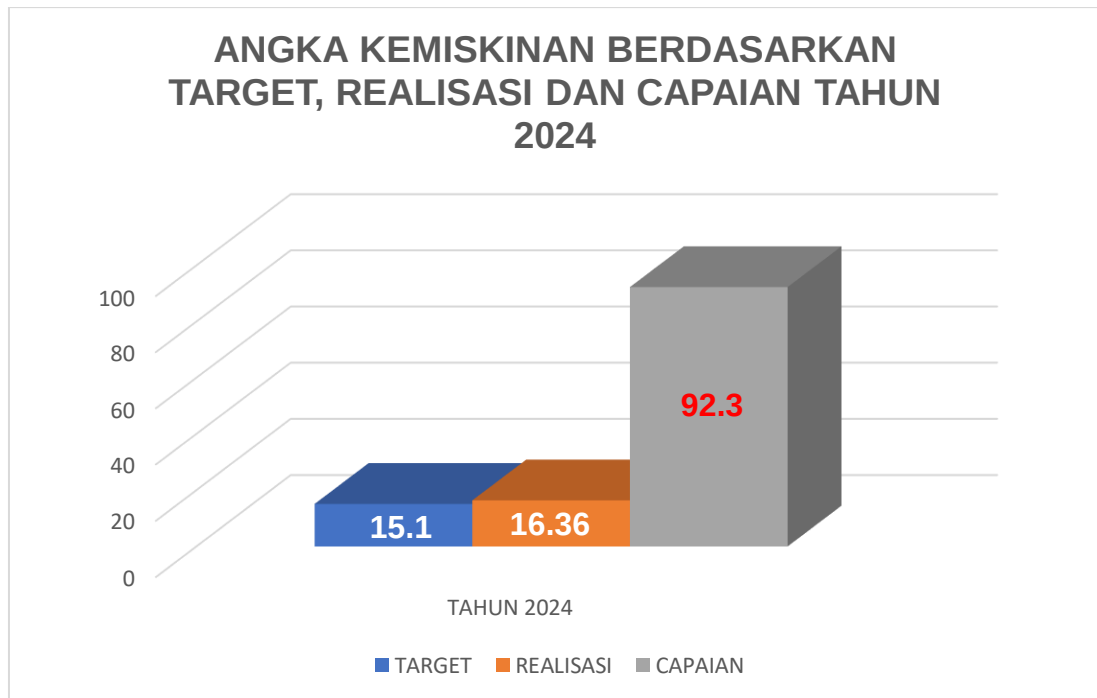
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan									
No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	41,00	50,92	41,00	52,23	41,00	65,76	61,00	73,89
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	80,00	89,20	80,00	91,40	80,00	81,36	85,00	88,68
3.	Nilai SAKIP Daerah	51,00	58,47	61,00	60,29	61,00	61,53	71,00	61,67

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

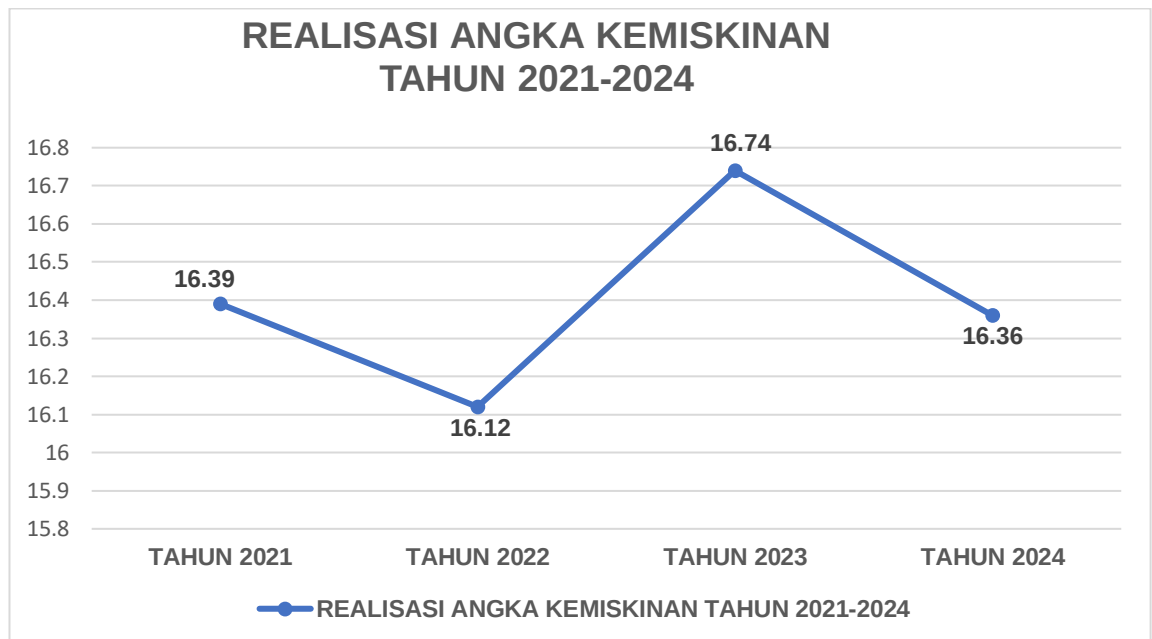
Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur antara lain tingkat pendapatan, pengeluaran rumah tangga (pangan dan atau non pangan), tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Dalam pengukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una 2024 yaitu angka kemiskinan dan gini ratio. Adapun penjelasan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Angka Kemiskinan



Angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 92,30%. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una jika dilihat dari realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) mengalami penurunan (trend positif) yaitu dimana pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yaitu 16,74 sedangkan pada tahun 2024 yaitu 16,36. Akan tetapi jika dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2024 bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una tidak konsisten. Pada tahun 2022 merupakan angka kemiskinan paling rendah yaitu sebesar 16,12 sedangkan angka kemiskinan paling besar yaitu pada tahun 2023 sebesar 16,74. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Pemanfaatan sumber daya dalam menurunkan angka kemiskinan mencakup berbagai aspek yang melibatkan cara-cara efisien dan efektif untuk memanfaatkan berbagai sumber daya (baik alam, manusia, maupun finansial) guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan sumber daya ini bisa dilihat dalam beberapa dimensi, seperti:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan. Jika dikelola dengan baik, SDA bisa menjadi sumber pendapatan yang besar bagi masyarakat yang hidup di daerah kaya SDA, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

- a) Pertanian : Sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah subur, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Program pemberdayaan petani, pelatihan teknik pertanian modern, dan akses terhadap pasar dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.
- b) Perikanan: Pemanfaatan hasil laut yang berkelanjutan termasuk teknik tangkap ikan yang ramah lingkungan, juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

- c) Pariwisata: pemanfaatan objek wisata yang berkelanjutan dapat berupa kelestarian objek wisata yang dapat dilestarikan dan dibuat. Wisata yang dapat dilestarikan bisa berupa wisata budaya, wisata seni, wisata alam, dsb. Serta wisata buatan yang dapat dibuat berupa wisata olahraga, wisata pertanian, dsb.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan pelatihan yang relevan adalah faktor penting dalam menurunkan angka kemiskinan. SDM yang terdidik dan terampil lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau memulai usaha sendiri yang dapat meningkatkan pendapatan.

- a) Pendidikan dan Keterampilan: Pemerintah dan lembaga swasta perlu meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di daerah terpencil. Dengan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.
- b) Pelatihan Kewirausahaan: Mengembangkan keterampilan kewirausahaan juga menjadi cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat miskin yang memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi bisa memulai usaha kecil yang menguntungkan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah aspek penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Tanpa adanya akses ke pembiayaan, masyarakat miskin akan kesulitan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan produktivitas.

- a) Akses Kredit Mikro: Pemberian akses kredit mikro kepada masyarakat miskin dapat mendorong mereka untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Program-program seperti ini banyak diterapkan oleh lembaga keuangan mikro atau bank yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan tanpa jaminan.

- b) Dana Desa dan Program Sosial: Dana desa atau program bantuan sosial dari pemerintah juga bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi dapat berperan besar dalam mengurangi kemiskinan, terutama dengan memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh informasi, memperbaiki keterampilan, atau membuka peluang pasar.

- a) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Masyarakat miskin dapat diuntungkan dengan akses ke teknologi informasi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi pasar, menjual produk secara online, atau memperoleh pelatihan keterampilan secara digital.
- b) Pertanian dan Teknologi Hijau: Teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

5. Pemanfaatan Infrastruktur dan Akses Pasar

Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas juga merupakan aspek penting. Dengan akses yang lebih baik ke pasar, daerah pedesaan atau daerah terpencil dapat lebih mudah menghubungkan produk mereka dengan konsumen yang lebih luas.

- a) Transportasi dan Akses ke Pasar: Infrastruktur yang baik memungkinkan hasil pertanian atau produk kerajinan lokal dijual dengan harga yang lebih tinggi karena biaya transportasi yang lebih rendah dan waktu yang lebih efisien.
- b) Program Pengembangan Wilayah Terpencil: Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri di daerah terpencil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

6. Peran Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya ini. Kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara optimal, seperti kebijakan fiskal, investasi dalam pendidikan, dan jaminan sosial, akan membantu menurunkan angka kemiskinan.

- a) Subsidi dan Bantuan Sosial: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang kebutuhan pokok atau layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, program bantuan sosial langsung juga dapat membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b) Kebijakan Pengurangan Ketimpangan: Kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial juga penting, seperti pengaturan pajak yang progresif dan redistribusi sumber daya.

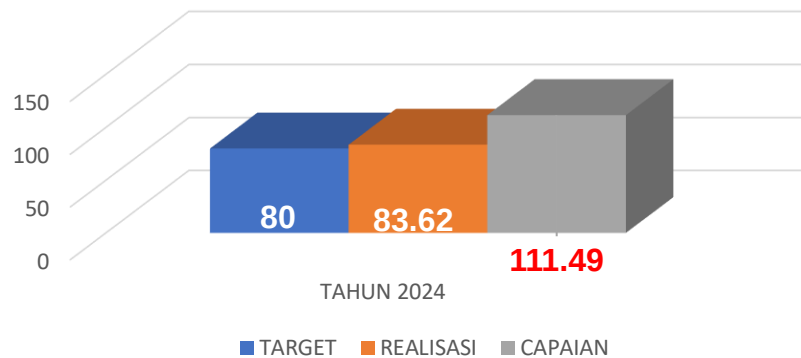
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Dalam mengukur kelestarian lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una-Una telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una 2024 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 111,49%. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2024



Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan meliputi:

1. Sumber Daya Alam:

- Air:** Pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk menjaga kualitas air dan ekosistem. Pengolahan limbah yang baik dan pelestarian sumber daya air dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Tanah:** Pengelolaan tanah yang bijaksana, seperti pengurangan konversi lahan untuk pembangunan yang tidak terkendali dan peningkatan konservasi tanah, membantu mengurangi erosi dan pencemaran.
- Energi Terbarukan:** Penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara.

2. Teknologi dan Inovasi:

- Teknologi Ramah Lingkungan:** Inovasi dalam teknologi, seperti kendaraan listrik, sistem pengelolaan sampah yang efisien, dan teknologi untuk mengurangi emisi, sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
- Teknologi Pengelolaan Sumber Daya:** Teknologi untuk mendaur ulang bahan, serta inovasi dalam pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan dapat meningkatkan kualitas ekosistem.

3. Sumber Daya Manusia:

- a) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan melalui pendidikan, kampanye, dan pelatihan dapat memotivasi perilaku yang lebih ramah lingkungan.
- b) Partisipasi Komunitas: Aksi kolektif dari masyarakat untuk menjaga lingkungan, seperti penanaman pohon, pengurangan penggunaan plastik, dan pengelolaan sampah, sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

4. Kebijakan dan Regulasi:

- a) Peraturan Lingkungan: Pemerintah dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti regulasi emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan kawasan alam.
- b) Insentif Ekonomi: Penyediaan insentif ekonomi untuk perusahaan dan individu yang menerapkan praktik ramah lingkungan, misalnya dengan pemberian subsidi untuk energi terbarukan atau teknologi yang ramah lingkungan.

5. Sumber Daya Keuangan:

- a) Pendanaan untuk Proyek Lingkungan: Investasi dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting. Misalnya, dana untuk reboisasi, konservasi habitat, atau pembersihan laut dari sampah plastik.
- b) *Corporate Social Responsibility (CSR)*: Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proyek-proyek pelestarian lingkungan.

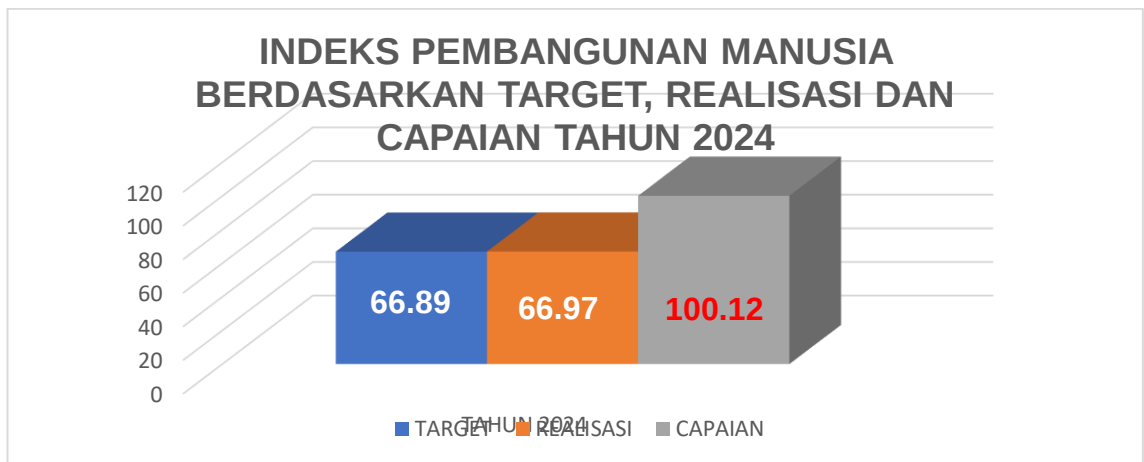
3. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una dapat meningkat melalui upaya untuk mengembangkan perekonomian di tingkat desa, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, merawat lingkungan, memperkuat hubungan sosial dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Kualitas hidup masyarakat

merupakan tujuan yang penting sehingga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 100,12% dimana perbandingan antara target sebesar 66,89 dan realisasi 66,97. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ada beberapa sumber daya yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan secara efektif. Beberapa sumber daya utama yang berperan dalam meningkatkan IPM meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM):

- a) Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan yang merata sangat penting untuk meningkatkan IPM. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan manusia, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat akan meningkatkan harapan hidup, mengurangi angka kematian, dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Sumber Daya Alam (SDA):

- a) Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDA yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan.

3. Teknologi dan Inovasi:

- a) Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan industri. Dengan teknologi yang tepat, kualitas hidup dapat ditingkatkan, dan ekonomi dapat berkembang lebih pesat.

4. Infrastruktur:

- a) Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, energi, dan akses informasi (internet), sangat berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang baik mempermudah akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Pembangunan yang merata, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil, akan membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah dan meningkatkan IPM.

5. Kebijakan Pemerintah:

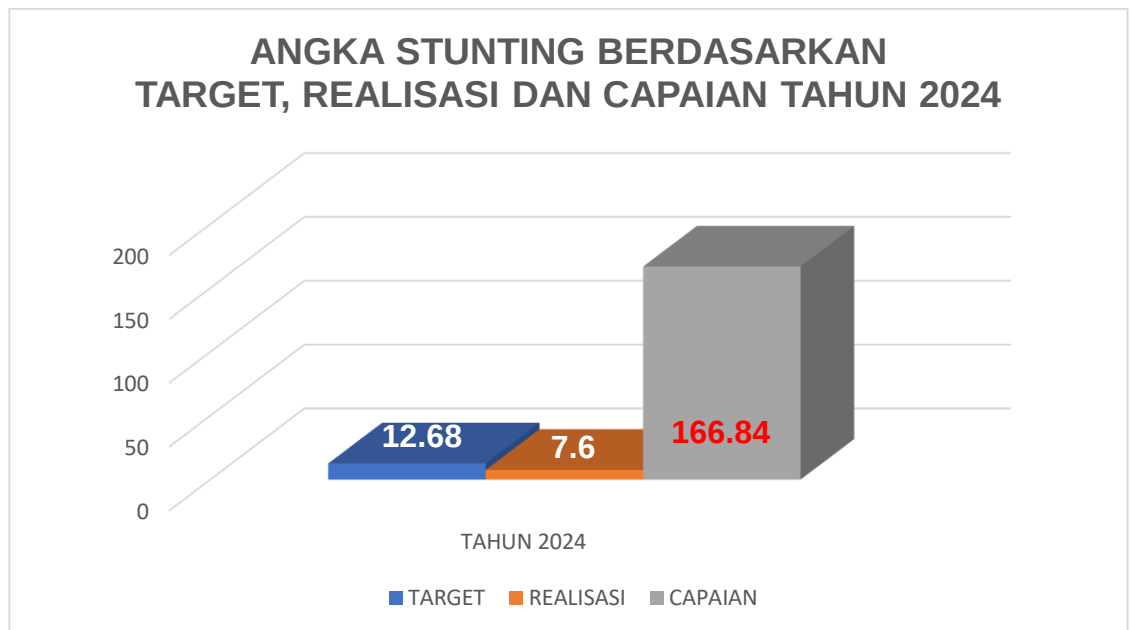
Kebijakan yang mendukung pembangunan manusia, seperti program jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan gratis atau subsidi, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah yang efektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan SDM.

b) Angka Stunting

Angka Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. Tips mengatasi stunting pada anak yang paling efektif adalah sebelum usia anak 2 tahun atau masih dalam masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Untuk itu, ibu

hamil sudah harus menjaga asupan gizinya sejak awal pembuahan dan memerhatikan beberapa mikronutrien yang penting dalam kehamilan, seperti asam folat, kalsium, dan zat besi.

Angka stunting di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 166,84% dimana perbandingan antara target sebesar 12,68 dan realisasi 7,60. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Penurunan angka stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai sumber daya dari berbagai sektor. Berikut adalah beberapa sumber daya yang dapat mendukung upaya penurunan angka stunting:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Tenaga Kesehatan: Dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemantauan gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT), dan konseling tentang pola makan sehat.
 - b) Pendidik dan Penyuluh Gizi: Tenaga pendidik dan penyuluh yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk ibu hamil, anak balita, serta pendidikan pola makan sehat kepada keluarga.

2. Sumber Daya Keuangan

- a. Anggaran Pemerintah: Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program-program yang bertujuan mengatasi stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, posyandu, serta penyuluhan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Alam

- a. Pangan Lokal: Memanfaatkan bahan pangan lokal yang bergizi dan murah untuk menciptakan pola makan sehat bagi keluarga, seperti sayuran, buah-buahan, dan sumber protein hewani maupun nabati yang kaya akan mikronutrien.
- b. Keanekaragaman Hayati: Penggunaan tanaman dan produk lokal yang mengandung zat gizi penting, misalnya daun kelor yang kaya akan vitamin A, zat besi, dan kalsium.

4. Teknologi dan Inovasi

- a) Teknologi Pertanian: Inovasi dalam pertanian yang meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, pertanian organik atau penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian yang bergizi.
- b) Aplikasi dan Sistem Informasi: Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk pemantauan status gizi, program edukasi gizi, serta pemetaan daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi untuk penanganan yang lebih terfokus.

5. Sumber Daya Infrastruktur

- a. Fasilitas Kesehatan: Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit yang dapat memberikan layanan kesehatan serta pemeriksaan gizi secara rutin.
- b. Akses ke Air Bersih dan Sanitasi: Penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai, karena kondisi sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi yang dapat memperburuk status gizi anak.

6. Partisipasi Masyarakat

- a. Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, kebersihan, dan pemantauan

tumbuh kembang anak. Masyarakat yang sadar akan dampak stunting akan lebih berperan dalam mendukung upaya pencegahan.

- b. Peran Organisasi Masyarakat Sipil: LSM dan organisasi masyarakat lainnya dapat membantu dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung penurunan stunting.

7. Regulasi

- a. Kebijakan Pemerintah: Pembentukan kebijakan yang mendukung penurunan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, subsidi pangan bergizi, atau insentif untuk daerah yang berhasil menurunkan angka stunting.

8. Dukungan dari Sektor Swasta

- a. Perusahaan Pangan: Perusahaan yang memproduksi makanan dapat berkontribusi dengan menciptakan produk pangan bergizi, mengedukasi masyarakat, serta mendukung program-program yang terkait dengan gizi masyarakat.
- b. Corporate Social Responsibility (CSR): Perusahaan dapat menjalankan program CSR yang berfokus pada pemberantasan stunting, misalnya dengan mendukung kampanye gizi, pembangunan fasilitas kesehatan, atau pelatihan masyarakat.

9. Sumber Daya Pendidikan

- a. Pendidikan Gizi di Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan tentang gizi dan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan keluarga mereka tentang pentingnya gizi yang baik.
- b. Pelatihan untuk Ibu: Program pendidikan untuk ibu, terutama ibu hamil dan menyusui, mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik dan praktik pemberian ASI eksklusif serta pola makan sehat.

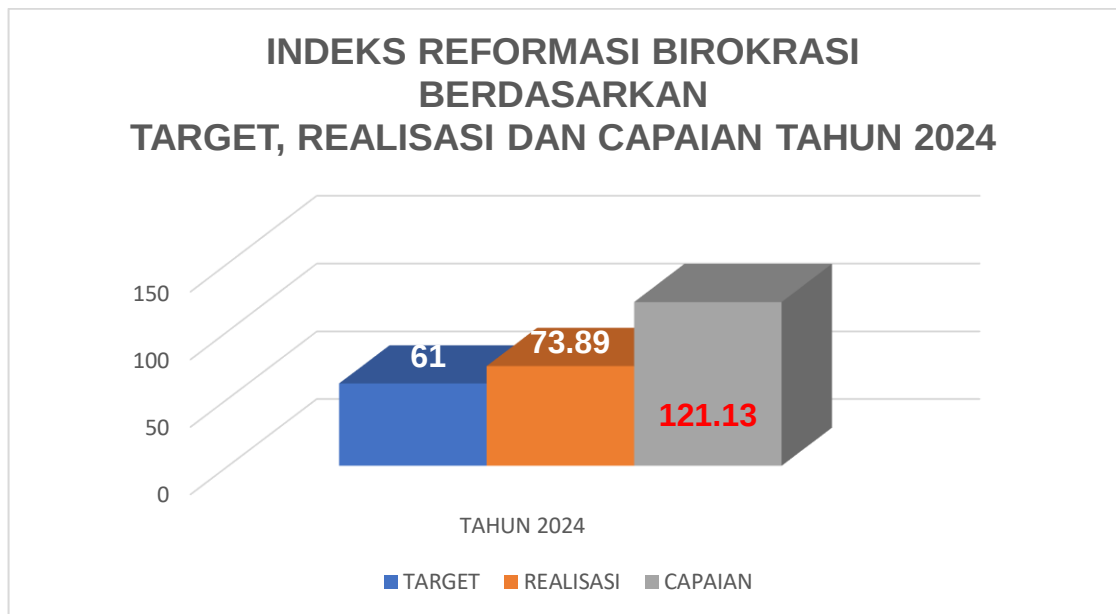
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

a) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

IRB di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 mencapai sebesar 121,13% dimana perbandingan antara target sebesar 61,00 dan realisasi 73,89. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Indonesia melibatkan berbagai sumber daya yang dapat mempengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan reformasi birokrasi itu sendiri. Beberapa sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan IRB meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM):

- a) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi: Aparatur sipil negara (ASN) perlu diberikan pelatihan yang tepat guna meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrasi yang efisien. Pelatihan ini mencakup manajemen pemerintahan, tata kelola yang baik, serta penguatan keterampilan teknis.

- b) Rekrutmen ASN yang Berkualitas: Seleksi dan rekrutmen ASN harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pada kompetensi agar mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Sumber Daya Keuangan:
- a) Anggaran untuk Reformasi: Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung program-program reformasi birokrasi, termasuk pengembangan SDM, peningkatan sistem informasi, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - b) Alokasi Anggaran yang Tepat: Pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung reformasi birokrasi, seperti modernisasi teknologi informasi, audit internal, dan evaluasi kebijakan.
3. Sumber Daya Teknologi dan Informasi:
- a) Sistem Informasi Manajemen: Peningkatan penggunaan sistem informasi yang efektif untuk manajemen data pegawai, anggaran, serta pengawasan kinerja birokrasi. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui e-government.
 - b) Infrastruktur Teknologi yang Memadai: Pembaruan infrastruktur TI di pemerintahan, seperti penggunaan aplikasi berbasis *cloud* dan data *analytics*, yang mendukung peningkatan efisiensi birokrasi.
4. Sumber Daya Regulasi dan Kebijakan:
- a) Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Reformasi: Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung reformasi birokrasi, seperti kebijakan desentralisasi, penguatan akuntabilitas, serta reformasi sistem penggajian dan karier ASN.
 - b) Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan: Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan-kebijakan birokrasi untuk memastikan efektivitas implementasinya serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

5. Sumber Daya Sosial dan Budaya:

- a) Peningkatan Kesadaran akan Reformasi: Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
- b) Budaya Kerja Profesional: Penguatan budaya kerja di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang responsif, profesional, dan tidak koruptif.

6. Sumber Daya Politik dan Kepemimpinan:

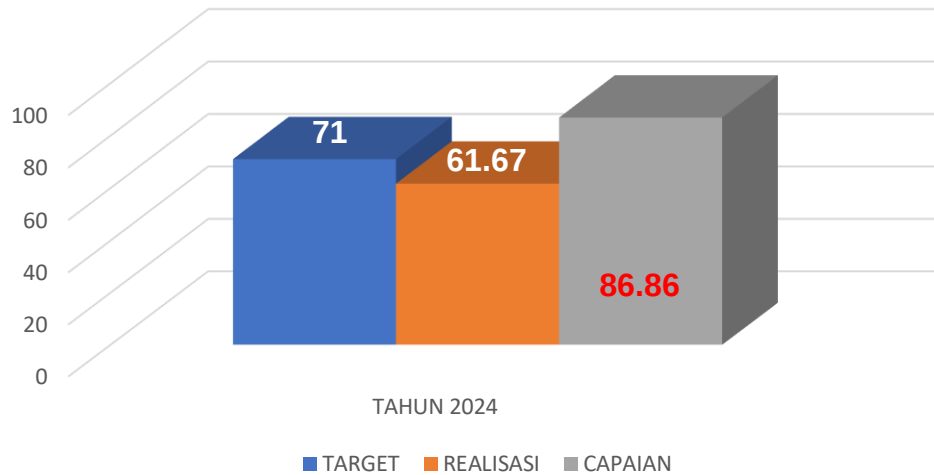
- a) Komitmen Politik dari Pemimpin: Dukungan kuat dari kepala negara atau kepala daerah sangat diperlukan untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi. Tanpa dukungan politik yang solid, reformasi birokrasi sering kali terhambat.
- b) Kepemimpinan yang Visioner: Pemimpin yang memiliki visi jelas tentang reformasi birokrasi dan mampu menggerakkan seluruh instansi pemerintah untuk menjalankan perubahan tersebut.

b) Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yang berkaitan dengan barang dan jasa kepada khalayak umum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 110,85% dimana perbandingan antara target sebesar 80,00 dan realisasi 88,68. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2024



Peningkatan indeks pelayanan publik sangat bergantung pada berbagai sumber daya yang dapat mendukung proses reformasi dan perbaikan kualitas layanan di sektor publik. Beberapa sumber daya yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks pelayanan publik antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Pelatihan dan Pendidikan: Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparat pemerintahan sangat penting. Pelatihan dalam keterampilan teknis, manajerial, dan pelayanan pelanggan dapat meningkatkan kualitas layanan.
- b) Motivasi dan Kesejahteraan: Motivasi yang tinggi dari pegawai pelayanan publik, yang didukung oleh insentif dan kesejahteraan yang memadai, akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Keuangan

- a) Anggaran yang Memadai: Untuk meningkatkan kualitas layanan, dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan teknologi, pelatihan pegawai, dan sebagainya.

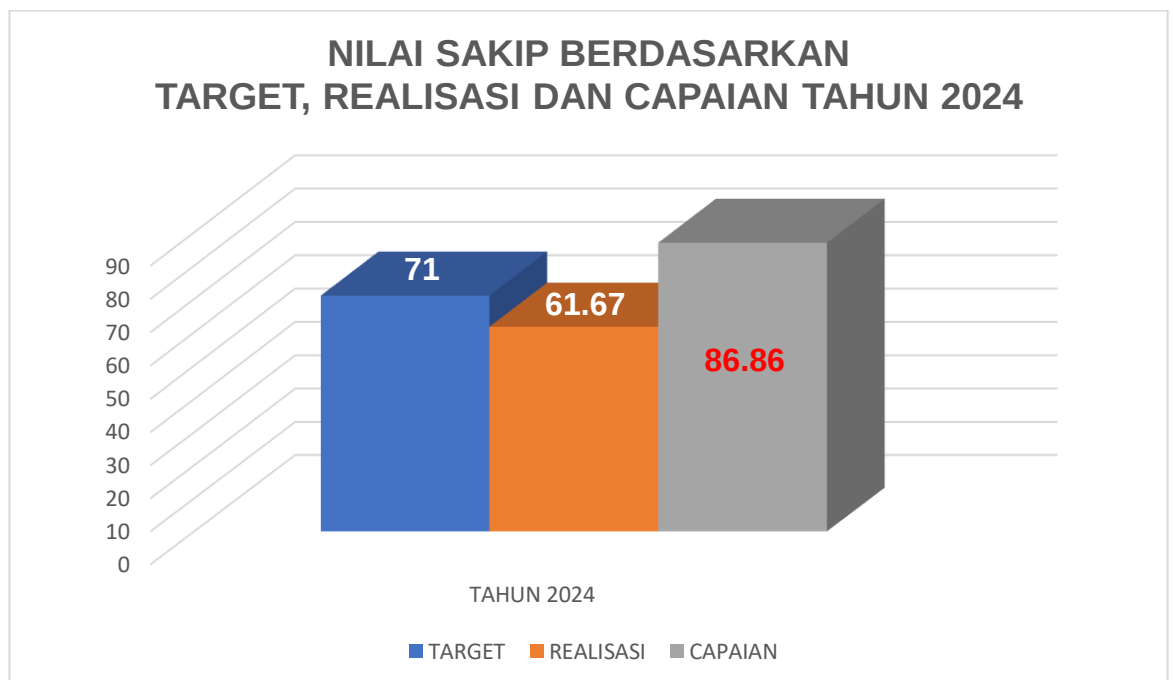
- b) Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting agar dana yang ada dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan.
- 3. Teknologi dan Infrastruktur
 - a) Sistem Informasi dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan publik atau sistem berbasis digital, dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Fasilitas dan Infrastruktur Fisik: Peningkatan fasilitas pelayanan yang nyaman dan aksesibel bagi masyarakat juga penting. Ini termasuk kantor pelayanan yang mudah diakses, serta fasilitas pendukung lainnya.
- 4. Regulasi
 - a) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti penerapan standar pelayanan minimal (SPM) atau pengembangan indikator kinerja utama (IKU).
 - b) Peraturan yang Jelas dan Transparan: Regulasi yang jelas akan memberikan panduan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efisien dan transparan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau hambatan dalam pelayanan.
- 5. Partisipasi dan Kolaborasi dengan Masyarakat
 - a) Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat sipil dan aparat sipil perlu dilibatkan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
 - b) Penyuluhan dan Sosialisasi: Sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik.
- 6. Evaluasi dan Pengawasan
 - a) Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan: Penerapan sistem evaluasi secara rutin terhadap kualitas pelayanan publik dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu diperbaiki.
 - b) Pengawasan yang Tepat: Pengawasan yang efektif, baik dari internal pemerintah maupun masyarakat, dapat mencegah terjadinya

penyimpangan dan memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c) Nilai SAKIP Daerah

SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini, kinerja diartikan sebagai pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai SAKIP di Kabupaten Tojo Una-Una jika dibandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tojo Una-Una tahun 2024 mencapai sebesar 86,86% dimana perbandingan antara target sebesar 71,00 dan realisasi 61,67. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya

negara secara efektif dan efisien. Sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini dapat dibagi dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Pelatihan dan Pendidikan: Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, penting bagi aparat pemerintah untuk memperoleh pelatihan yang sesuai dalam hal manajemen kinerja, evaluasi, serta sistem akuntansi dan pelaporan. Program pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun dan mengelola laporan kinerja.
- b) Penempatan Tenaga Profesional: Tenaga ahli dalam bidang akuntansi, auditing, dan manajemen kinerja sangat dibutuhkan. Penempatan profesional dengan keahlian khusus akan memperkuat sistem akuntabilitas.

2. Sumber Daya Teknologi

- a) Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMK) Pemerintah: Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan dalam pengumpulan data, pelaporan kinerja, dan monitoring.
- b) Platform Pelaporan dan Evaluasi Elektronik: Pengembangan platform untuk pelaporan dan evaluasi berbasis teknologi akan mempermudah pengawasan dan memberikan akses langsung bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

3. Sumber Daya Keuangan

- a) Anggaran untuk Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Ini termasuk anggaran untuk kegiatan audit, pelatihan, serta pengembangan sistem informasi yang lebih efektif.
- b) Alokasi Anggaran untuk Program Peningkatan Kinerja: Untuk meningkatkan kinerja, alokasi anggaran yang memadai untuk program-program yang berorientasi pada pencapaian target kinerja juga sangat penting.

4. Sumber Daya Institusional

- a) Kelembagaan Pengawasan: Institusi pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Inspektorat memiliki peran besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mereka perlu diberikan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas-tugas mereka secara efektif.
- b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP): Penyusunan dan penerapan SOP yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja akan memberikan pedoman yang tegas bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka.

5. Sumber Daya Sosial dan Partisipasi Masyarakat

- a) Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.
- b) Komunikasi dan Transparansi: Pemerintah perlu menyediakan saluran komunikasi yang terbuka, seperti publikasi laporan kinerja dan penyelenggaraan forum atau diskusi yang melibatkan masyarakat.

6. Regulasi

- a) Penyusunan Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung sistem akuntabilitas, seperti kewajiban pelaporan kinerja dan transparansi penggunaan anggaran. Kebijakan ini perlu didukung dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas.
- b) Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Regulasi yang mendukung independensi lembaga pengawasan serta pemberian wewenang yang cukup bagi auditor dan pengawas eksternal sangat penting dalam memperkuat akuntabilitas.

7. Sumber Daya Evaluasi dan Audit

- a) Audit Kinerja secara Berkala: Evaluasi dan audit kinerja yang rutin akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan

efisiensi program pemerintah. Ini membantu dalam mengambil keputusan perbaikan.

- b) Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur: Sistem ini harus dapat mengukur hasil dan dampak nyata dari setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah

f. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

a) Angka Kemiskinan

Pemanfaatan program atau kegiatan dalam penurunan angka kemiskinan adalah topik yang sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun hasil analisis beberapa program atau kegiatan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

1. Program Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
 - a) Tujuan: Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya yang rentan terhadap risiko kesehatan dan ketenagakerjaan.
 - b) Analisis: Program ini sangat penting untuk menjaga akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan memberikan jaminan ketenagakerjaan. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan inklusivitas agar masyarakat miskin betul-betul dapat mengakses program ini, karena sebagian dari mereka masih menghadapi kendala ekonomi untuk membayar iuran atau kurangnya pemahaman tentang manfaat yang ada.
2. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - a) Tujuan: Memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - b) Analisis: BLT efektif untuk memberikan bantuan cepat dan langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan jangka panjang masih dipertanyakan, karena sifatnya yang sementara. Sebaiknya,

program ini diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

- a) Tujuan: Menyediakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan.
- b) Analisis: PKH memiliki dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Dengan adanya syarat seperti kehadiran anak di sekolah atau pemeriksaan kesehatan rutin, program ini mendorong keluarga untuk berinvestasi dalam masa depan anak-anak mereka. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang tepat dan bahwa ada mekanisme pemantauan yang kuat.

4. Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- a) Tujuan: Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b) Analisis: Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi, memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk mengakses modal dan pelatihan untuk memulai usaha mereka sendiri. Program ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha dan persaingan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan manajemen dan akses pasar yang lebih baik.

5. Program Pembangunan Infrastruktur Desa

- a) Tujuan: Meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan untuk memperbaiki aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.
- b) Analisis: Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membuka akses pasar, mempermudah mobilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada manajemen yang efisien, transparansi anggaran, serta

partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

6. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

- a) Tujuan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- b) Analisis: Pendidikan adalah kunci utama dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang. Program pelatihan keterampilan bisa membantu masyarakat miskin memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha sendiri. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan permintaan pasar dan dapat diterima oleh masyarakat yang terpinggirkan.

8. Program Penyuluhan dan Pendampingan

- a) Tujuan: Memberikan informasi, pengetahuan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam pengelolaan keuangan, memulai usaha, atau mengakses layanan sosial.
- b) Analisis: Penyuluhan dan pendampingan membantu masyarakat miskin memahami cara-cara untuk keluar dari kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Program ini efektif jika dilakukan secara kontinu dan melibatkan tenaga pendamping yang kompeten serta memahami kondisi setempat.

Penurunan angka kemiskinan adalah hasil dari kombinasi kebijakan program pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan, serta redistribusi kekayaan yang adil. Meskipun banyak negara yang berhasil menurunkan kemiskinan, tantangan seperti ketimpangan sosial dan regional, serta krisis global, masih menjadi hambatan dalam mencapai pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program dan kegiatan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem serta

kualitas hidup manusia. Setiap program yang dijalankan memiliki tantangannya sendiri, baik itu dari segi pembiayaan, keterlibatan masyarakat, regulasi, maupun pelaksanaan. Untuk mencapai hasil yang optimal, program-program ini perlu dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan terus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kualitas lingkungan hidup dapat terus ditingkatkan. Hasil analisis program/kegiatan dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

- a. Tujuan: Mengurangi volume sampah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan mencegah pencemaran lingkungan.
- b. Analisis: Program pengelolaan sampah dan daur ulang sangat penting untuk mengurangi beban sampah yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) dan mencegah polusi, terutama sampah plastik. Namun, tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan rendahnya infrastruktur pendukung seperti tempat daur ulang yang memadai. Selain itu, program ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang.

2. Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Alam

- a. Tujuan: Melestarikan ekosistem hutan, mengurangi deforestasi, dan meningkatkan kualitas udara serta keberagaman hayati.
- b. Analisis: Rehabilitasi hutan adalah langkah penting dalam melawan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem. Program ini juga penting untuk memulihkan daerah yang terkena deforestasi atau kerusakan akibat bencana alam. Namun, program ini seringkali terhambat oleh konflik lahan, kurangnya pendanaan, dan sulitnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini sangat penting untuk keberlanjutan dan efektivitasnya.

3. Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

- a. Tujuan: Mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
- b. Analisis: Program ini penting untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, seperti bencana alam, gangguan terhadap ekosistem, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Beberapa program yang umum dilaksanakan adalah pembatasan emisi di sektor energi, transportasi, dan industri. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa sektor-sektor ini dapat beralih ke energi bersih dan teknologi ramah lingkungan tanpa merugikan perekonomian, terutama di negara berkembang. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama internasional dan kebijakan yang mendukung teknologi hijau.

4. Pembangunan Infrastruktur Hijau

- a. Tujuan: Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, sistem drainase ramah lingkungan, dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan.
- b. Analisis: Infrastruktur hijau membantu mengurangi polusi udara, mengatur suhu kota, dan menyediakan ruang bagi ekosistem alami di daerah perkotaan. Program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik penduduk perkotaan. Namun, tantangannya adalah keterbatasan ruang di perkotaan dan biaya yang tinggi dalam pembangunannya. Selain itu, keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau.

5. Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan

- a. Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan cara-cara untuk berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan.
- b. Analisis: Pendidikan dan penyuluhan lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan perilaku di masyarakat. Program ini dapat mencakup penyuluhan tentang pengelolaan sampah, penggunaan energi efisien, dan pelestarian alam. Namun,

tantangannya adalah kurangnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk mereka terkait lingkungan. Program ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua elemen masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa.

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

- a. Tujuan: Mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan.
- b. Analisis: Program ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam pengelolaan air, misalnya, penting untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya agar tetap bisa dimanfaatkan untuk pertanian, konsumsi, dan industri. Namun, tantangannya adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi alam, serta peraturan yang seringkali belum efektif dalam melindungi sumber daya alam. Program ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dan kerjasama antara sektor publik dan swasta.

7. Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi

- a. Tujuan: Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- b. Analisis: Pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program efisiensi energi juga dapat membantu mengurangi pemborosan energi dan menurunkan biaya konsumsi energi. Namun, tantangannya adalah investasi awal yang besar untuk infrastruktur energi terbarukan dan adaptasi teknologi yang masih terbatas di beberapa wilayah, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

8. Program Adaptasi Perubahan Iklim

- a. Tujuan: Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya.

- b. Analisis: Program adaptasi perubahan iklim berfokus pada kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, konservasi air, dan perencanaan tata ruang yang lebih adaptif. Namun, tantangan besar dalam program ini adalah keterbatasan dana, kurangnya data yang akurat tentang dampak perubahan iklim di tingkat lokal, serta ketidaksetujuan politik di beberapa negara atau daerah yang dapat menghambat implementasi

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemanfaatan program/kegiatan dalam peningkatan IPM berfokus pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk meningkatkan IPM secara efektif, program-program tersebut harus saling terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang spesifik. Tantangan utama adalah memastikan akses yang merata untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang lebih rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Selain itu, perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Program yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan IPM harus memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis program/kegiatan dalam pembangunan IPM di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Program Kesehatan Masyarakat (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN, Posyandu)
 - a. Tujuan: Meningkatkan status kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan harapan hidup.
 - b. Analisis: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini berpotensi memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, program Posyandu

yang berfokus pada ibu dan anak membantu mendeteksi dini masalah kesehatan dan mencegah malnutrisi serta penyakit menular. Namun, tantangan utama adalah kesenjangan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil, serta kualitas layanan yang masih bervariasi antar wilayah.

2. Program Pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun, Beasiswa, Pendidikan Kejuruan)

- a. Tujuan: Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
- b. Analisis: Program Wajib Belajar 12 Tahun sangat penting dalam memastikan akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak di Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu, beasiswa dan program pendidikan kejuruan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun demikian, tantangan besar adalah kualitas pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kualitas pengajaran yang masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri.

3. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

- a. Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
- b. Analisis: Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik adalah indikator utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup masyarakat. Program yang berfokus pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi akan mengurangi prevalensi penyakit berbasis air, seperti diare, serta meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Tantangannya adalah penyediaan infrastruktur ini di daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan dalam pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka.
- b. Analisis: Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan kunci untuk mempercepat pencapaian IPM, karena perempuan memainkan peran besar dalam keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan perempuan yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berdampak positif terhadap peningkatan IPM. Namun, tantangan besar adalah masih adanya ketidaksetaraan gender dan hambatan sosial-budaya yang membatasi peran aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

b) Angka Stunting

Pemanfaatan program/kegiatan dalam penurunan stunting sangat bergantung pada pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup pemberian makanan bergizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Setiap program yang diimplementasikan harus mempertimbangkan kondisi lokal dan memastikan bahwa masyarakat, terutama keluarga miskin dan ibu hamil, mendapatkan manfaat yang optimal. Tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan program-program ini dan memperbaiki kualitas pelaksanaannya agar bisa benar-benar mengurangi prevalensi stunting di seluruh wilayah, terutama di daerah yang paling terdampak. Adapun hasil analisis berdasarkan program/kegiatan dalam penurunan angka stunting adalah sebagai berikut:

1. Berkat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

- a. Tujuan: Meningkatkan pemantauan kesehatan ibu dan anak, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan stunting, termasuk pemantauan pertumbuhan dan pemberian imunisasi.
- b. Analisis: Posyandu berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar seperti pemantauan status gizi anak, penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita. Program ini mampu

mencapai wilayah-wilayah pedesaan yang seringkali terisolasi dari fasilitas kesehatan formal. Namun, tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan operasional Posyandu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kader kesehatan yang seringkali kurang terlatih dan kurang mendapatkan insentif yang memadai.

2. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

- a. Tujuan: Memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak balita untuk mengurangi risiko stunting.
- b. Analisis: Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil adalah strategi langsung dalam meningkatkan status gizi anak dan ibu untuk mencegah stunting. Makanan tambahan ini, terutama yang mengandung protein, vitamin, dan mineral, dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi yang kurang pada keluarga miskin. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program ini adalah distribusi yang merata dan memastikan makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan. Selain itu, ada risiko ketergantungan jika program ini tidak disertai dengan edukasi terkait pola makan yang sehat.

3. Program Imunisasi

- a. Tujuan: Meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk kondisi stunting.
- b. Analisis: Imunisasi merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit infeksi yang bisa memperburuk status gizi anak. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak-anak balita dapat menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko stunting. Program imunisasi yang dilaksanakan secara efektif dapat membantu mengurangi angka kematian anak dan meminimalkan dampak buruk pada pertumbuhan mereka. Tantangannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi di daerah-daerah terpencil dan memastikan bahwa semua anak menerima vaksin yang dibutuhkan tepat waktu.

4. Pendidikan Gizi dan Penyuluhan Kesehatan

- a. Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu, tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
- b. Analisis: Penyuluhan mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, serta pemilihan makanan bergizi dapat membantu keluarga dalam mencegah stunting. Pendidikan gizi yang tepat dapat mengubah perilaku keluarga, khususnya ibu, dalam memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa penyuluhan ini dilakukan secara terus-menerus dan disertai dengan pendekatan yang berbasis pada budaya lokal agar mudah diterima oleh masyarakat.

5. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- a. Tujuan: Meningkatkan akses ibu hamil ke pemeriksaan kesehatan yang tepat, serta memastikan asupan gizi ibu yang memadai selama kehamilan dan setelah melahirkan.
- b. Analisis: Program KIA sangat penting untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan gizi yang cukup, pemeriksaan kesehatan yang tepat, dan imunisasi yang diperlukan selama kehamilan dan setelah melahirkan. Kesehatan ibu yang baik akan mempengaruhi kesehatan janin dan bayi yang dilahirkan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan ibu hamil di daerah terpencil mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, serta kesadaran ibu akan pentingnya gizi selama kehamilan.

6. Program Penyuluhan Tentang ASI Eksklusif

- a. Tujuan: Meningkatkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi selama enam bulan pertama kehidupan untuk mencegah stunting.
- b. Analisis: ASI eksklusif merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan bayi mendapatkan gizi yang optimal dalam 6 bulan pertama kehidupan. Program penyuluhan yang mempromosikan pentingnya ASI eksklusif membantu ibu memahami manfaat ASI dan cara menyusui yang benar. Namun, tantangannya adalah

meningkatnya tren pemberian susu formula, terutama di kalangan keluarga yang memiliki pendapatan lebih tinggi, serta kurangnya pengetahuan tentang cara-cara yang tepat dalam menyusui, terutama di daerah pedesaan.

7. Intervensi Gizi pada Layanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik)
 - a. Tujuan: Memberikan layanan kesehatan yang dapat mendeteksi masalah gizi pada anak lebih awal dan memberikan penanganan yang sesuai.
 - b. Analisis: Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya berperan penting dalam mengidentifikasi stunting pada anak-anak sejak dini, serta memberikan penanganan medis yang sesuai, seperti pemberian suplemen gizi dan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Dengan pendekatan ini, stunting dapat dideteksi lebih awal dan ditangani sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Tantangan utamanya adalah pemerataan akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, serta kesadaran orang tua tentang pentingnya pemeriksaan rutin untuk anak.
8. Program Peningkatan Keterampilan untuk Keluarga (Pelatihan Pertanian, Pengelolaan Keuangan)
 - a. Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di daerah pedesaan, dengan memberikan pengetahuan tentang pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
 - b. Analisis: Keterampilan yang lebih baik dalam bidang pertanian dapat membantu keluarga meningkatkan produksi pangan bergizi, yang dapat mengurangi kerentanannya terhadap kekurangan gizi. Selain itu, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk membeli bahan pangan bergizi dan memenuhi kebutuhan kesehatan. Namun, implementasi program ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat.

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

a) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pemanfaatan program/kegiatan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai program seperti e-government, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan transparansi data publik menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Tantangan utama yang dihadapi dalam reformasi birokrasi adalah resistensi terhadap perubahan, ketimpangan infrastruktur, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap program dijalankan dengan konsistensi dan pengawasan yang baik.

1. Penerapan e-Government berbasis Digitalisasi

- a. Tujuan: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Analisis: Program e-Government berbasis digitalisasi merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi, karena memungkinkan pemerintah secara lebih cepat, transparan dan akuntabel dalam menerapkan pembaharuan sebuah pemerintahan yang *agile*. Sistem pemerintah berbasis online seperti sistem pendaftaran, pembayaran dan pengajuan izin memudahkan dan mengurangi interaksi langsung yang dapat membuka peluang korupsi. Namun, tantangannya adalah memastikan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan pegawai untuk penggunaan sistem, serta mengatasi masalah ketimpangan digital, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai.

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)

- a. Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.
- b. Analisis: Program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan keterampilan teknis, manajerial, serta pengetahuan tentang etika pelayanan publik dapat memperbaiki kinerja birokrasi secara keseluruhan. Program ini juga mencakup penyuluhan

mengenai budaya pelayanan yang baik, yang dapat mempengaruhi cara kerja ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan pelatihan yang dilakukan benar-benar relevan dengan tugas yang dihadapi oleh ASN, serta adanya sistem evaluasi yang efektif untuk menilai apakah kompetensi yang diperoleh benar-benar berdampak positif pada kualitas pelayanan.

3. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Tujuan: Mengelola ASN dengan lebih efektif, efisien, dan berdasarkan pada meritokrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas birokrasi.
- b. Analisis: Reformasi dalam pengelolaan SDM ASN, seperti pemenuhan jabatan berdasarkan kompetensi (merit system), penataan ulang struktur organisasi, serta peningkatan transparansi dalam proses seleksi dan promosi jabatan, merupakan aspek penting dalam reformasi birokrasi. Dengan menerapkan prinsip meritokrasi, pegawai yang terpilih diharapkan memiliki kualifikasi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Tantangan yang dihadapi adalah budaya birokrasi yang cenderung mengedepankan senioritas dan politisasi dalam penempatan jabatan, serta adanya resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Open Data

- a. Tujuan: Meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah kepada publik untuk memperkuat akuntabilitas.
- b. Analisis: Program open data atau keterbukaan data pemerintah sangat penting dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan menyediakan data yang dapat diakses publik, seperti anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Namun, tantangan utama adalah memastikan data yang disediakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan pelatihan kepada pegawai untuk mengelola data publik dengan baik.

5. Penerapan Sistem Reward and Punishment

- a. Tujuan: Meningkatkan motivasi ASN untuk bekerja lebih baik dan mengurangi perilaku koruptif dalam birokrasi.
- b. Analisis: Sistem penghargaan (reward) untuk ASN yang berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik, serta sistem hukuman (punishment) bagi yang terlibat dalam korupsi atau pelanggaran lainnya, dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Ini dapat menciptakan motivasi bagi ASN untuk berperilaku lebih baik dan bekerja lebih efektif. Namun, penerapan sistem ini harus adil dan transparan, serta diikuti dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan sistem reward dan punishment yang justru memperburuk citra birokrasi.

6. Reformasi Sistem Penganggaran dan Keuangan Publik

- a. Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara serta mengurangi pemborosan dan korupsi.
- b. Analisis: Reformasi dalam sistem penganggaran dan keuangan publik yang transparan dan berbasis hasil dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Program ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil, bukan hanya berdasarkan pada input atau belanja rutin. Tantangannya adalah budaya anggaran yang seringkali berfokus pada kuota atau prosedur formal tanpa mempertimbangkan hasil atau dampak nyata terhadap masyarakat.

7. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

- a. Tujuan: Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja birokrasi dan meminimalkan terjadinya penyimpangan.
- b. Analisis: Penguatan sistem pengawasan internal melalui inspektorat atau unit pengawasan lainnya serta pengawasan eksternal melalui lembaga seperti Ombudsman atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Namun, tantangan utama adalah memastikan

bahwa pengawasan ini dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari pengaruh eksternal.

b) Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP)

Pemanfaatan program dan kegiatan dalam peningkatan IKPP sangat bergantung pada penerapan teknologi, reformasi birokrasi, transparansi, serta peningkatan kompetensi ASN. Dengan adanya digitalisasi, standar operasional yang jelas, sistem pengaduan yang efektif dan evaluasi berbasis *feedback*, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, tantangan utama adalah memastikan pemerataan akses, keberlanjutan program dan pengawasan yang efektif agar hasil dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses. Peningkatan IKPP bukan hanya tentang kecepatan pelayanan, tetapi juga tentang kualitas, inklusifitas dan transparansi dalam setiap proses pelayanan publik. Adapun hasil analisis program/kegiatan dalam peningkatan IKPP di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Publik (*e-Government*)

- a. Tujuan: Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara cepat, efisien, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Analisis: Program digitalisasi layanan publik atau *e-Government* adalah langkah utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui platform online, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pendaftaran, pembayaran pajak, perizinan, hingga pengajuan keluhan atau pengaduan. Program seperti sistem informasi pelayanan terpadu (SIPT), *e-Office*, atau aplikasi pelayanan publik berbasis web/mobile sangat efektif untuk mempercepat proses layanan dan mengurangi interaksi fisik yang bisa membuka peluang korupsi. Tantangan utama adalah kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil, serta kualitas infrastruktur yang masih perlu diperbaiki agar akses masyarakat terhadap layanan digital dapat terjamin.

2. Penyederhanaan Prosedur

- a. Tujuan: Mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan efisiensi.
- b. Analisis: Reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan prosedur administrasi adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program penyederhanaan prosedur, seperti penggunaan sistem "one-stop service" untuk berbagai jenis perizinan atau layanan publik, dapat mengurangi waktu tunggu dan menghilangkan hambatan administrasi yang tidak perlu. Dengan adanya prosedur yang lebih sederhana, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan tanpa harus melalui banyak tahapan yang memakan waktu. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa penyederhanaan prosedur tidak mengorbankan kualitas layanan atau pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Pelayanan Publik Berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP)

- a. Tujuan: Menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Analisis: Penerapan SOP yang jelas untuk setiap jenis pelayanan publik akan memastikan bahwa layanan diberikan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP membantu pegawai untuk mengetahui dengan tepat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dengan meminimalkan kesalahan manusia. Tantangan utama adalah memastikan bahwa SOP diterapkan dengan disiplin dan tidak hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang jelas. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan SOP sangat diperlukan untuk melihat efektivitasnya.

4. Penguatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

- a. Tujuan: Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme ASN agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Analisis: Program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah

memiliki keterampilan yang tepat dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN, kualitas pelayanan publik bisa meningkat secara signifikan. Pelatihan ini bisa mencakup pelatihan teknis, pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dan etika profesi. Namun, tantangan utama adalah kurangnya anggaran dan waktu bagi ASN untuk mengikuti pelatihan secara rutin serta memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.

5. Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat

- a. Tujuan: Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan mengenai pelayanan yang diterima.
- b. Analisis: Sistem pengaduan yang baik dan responsif merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik. Program seperti "LAPOR!" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) memungkinkan masyarakat untuk memberikan feedback langsung tentang pelayanan yang mereka terima, serta memantau bagaimana pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Dengan adanya sistem pengaduan yang transparan, pemerintah dapat memperbaiki kualitas layanan berdasarkan pengalaman langsung masyarakat. Namun, tantangan besar adalah memastikan bahwa setiap pengaduan ditanggapi dengan cepat dan tuntas, serta menghindari adanya diskriminasi atau penundaan dalam proses penyelesaian pengaduan.

6. Sistem Evaluasi dan Feedback Pengguna Layanan

- a. Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat yang menerima pelayanan.
- b. Analisis: Program evaluasi berbasis feedback pengguna layanan membantu pemerintah untuk menilai kinerja birokrasi dalam memberikan layanan publik. Feedback dari masyarakat dapat berupa survei kepuasan pelanggan, wawancara langsung, atau melalui platform digital. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan dalam kualitas pelayanan, baik dalam hal prosedur,

sikap petugas, maupun waktu pelayanan. Tantangan dalam hal ini adalah menjaga objektivitas dan menghindari manipulasi terhadap hasil evaluasi, serta memastikan bahwa setiap kritik atau saran dapat direspons dengan baik oleh pemerintah.

7. Penerapan Sistem Reward and Punishment

- a. Tujuan: Meningkatkan motivasi ASN untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- b. Analisis: Penerapan sistem reward and punishment bagi ASN dapat memberikan insentif bagi pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pegawai yang berprestasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik bisa mendapatkan penghargaan, sementara yang melanggar standar pelayanan atau berperilaku buruk dapat dikenakan sanksi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan ASN akan lebih termotivasi untuk berusaha meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan.

8. Peningkatan Aksesibilitas Layanan untuk Masyarakat Rentan

- a. Tujuan: Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik.
- b. Analisis: Program untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat rentan merupakan langkah penting dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan adil. Hal ini bisa mencakup penyediaan layanan khusus bagi disabilitas, pembuatan fasilitas yang ramah bagi lansia, atau penyederhanaan proses administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua instansi pemerintah memiliki infrastruktur yang memadai untuk melayani kelompok rentan dan memastikan bahwa semua pegawai dilatih untuk memberikan pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka.

c) Nilai SAKIP Daerah

Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sangat bergantung pada penerapan berbagai program yang dapat mengukur, memantau, dan mengevaluasi hasil dan dampak dari kebijakan serta pengelolaan anggaran. Penerapan sistem manajemen kinerja yang berbasis pada indikator yang terukur, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta transparansi anggaran adalah langkah utama dalam mencapainya. Selain itu, pemberian ruang untuk partisipasi publik, sistem pengaduan, dan pelaporan kinerja yang terbuka membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Adapun hasil analisis program/kegiatan dalam peningkatan SAKIP di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System*)
 - a. Tujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta mengukur pencapaian hasil dari kebijakan yang diterapkan.
 - b. Analisis: Sistem manajemen kinerja memungkinkan pemerintah untuk mengelola dan memonitor hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan, serta mengevaluasi pencapaian berdasarkan indikator tersebut. Misalnya, setiap kementerian dan lembaga diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memantau pencapaiannya melalui sistem pelaporan kinerja. Tantangan utama adalah memastikan bahwa indikator yang digunakan relevan, dapat diukur dengan jelas, dan mencerminkan dampak yang nyata dari kebijakan tersebut, bukan hanya aktivitas administratif semata.
2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal
 - a. Tujuan: Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan pemborosan.

- b. Analisis: Pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Ombudsman dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan implementasi program berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan pengawasan yang objektif, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau birokrasi.
3. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)
 - a. Tujuan: Mengalokasikan anggaran berdasarkan pencapaian hasil yang terukur dan dampak dari program atau kegiatan.
 - b. Analisis: Program anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk menyusun anggaran yang tidak hanya didasarkan pada input atau belanja rutin, tetapi juga berdasarkan output atau hasil yang akan dicapai. Dengan sistem ini, setiap alokasi anggaran akan dipertanggungjawabkan berdasarkan pencapaian kinerja yang telah ditentukan. Misalnya, kementerian atau lembaga harus menyusun laporan kinerja tahunan yang menunjukkan hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Tantangan utama adalah penerapan sistem ini memerlukan data yang akurat dan sistem pengukuran yang baik untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
4. Penerapan Indikator Kinerja yang Jelas dan Terukur
 - a. Tujuan: Menyusun indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian output, outcome, dan dampak program atau kegiatan secara tepat.
 - b. Analisis: Program yang berhasil dalam meningkatkan pengukuran kinerja harus memiliki indikator yang jelas dan terukur, baik itu berbasis kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti output (hasil langsung), outcome (dampak menengah), dan impact (dampak jangka panjang). Misalnya, dalam

sektor pendidikan, indikator dapat berupa angka kelulusan, tingkat partisipasi pendidikan, atau perbaikan kualitas pengajaran. Tantangannya adalah merumuskan indikator yang tidak hanya menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga mencerminkan perubahan yang nyata di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Indikator yang tidak tepat atau kabur dapat menyebabkan kesalahan dalam evaluasi kinerja.

5. Penggunaan Sistem Informasi Kinerja

- a. Tujuan: Mempermudah pengumpulan dan analisis data terkait kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
- b. Analisis: Sistem informasi kinerja yang terintegrasi, seperti e-Planning, e-Budgeting, atau aplikasi berbasis teknologi lainnya, sangat penting untuk memonitor dan melaporkan pencapaian kinerja secara real-time. Program ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data dari berbagai lembaga atau daerah secara efisien dan menyajikan informasi kinerja yang dapat diakses oleh pengambil kebijakan. Penggunaan sistem ini dapat mempercepat proses pemantauan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa data yang digunakan untuk evaluasi adalah up-to-date. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan kualitas data yang terkumpul serta akses dan pemahaman yang merata tentang penggunaan sistem ini di seluruh level pemerintahan.

6. Evaluasi Kinerja Secara Berkala

- a. Tujuan: Menilai pencapaian hasil dari program dan kegiatan melalui evaluasi yang objektif dan sistematis.
- b. Analisis: Program evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah untuk melihat apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti survei, wawancara, analisis data, atau audit kinerja. Evaluasi juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Misalnya, jika sebuah program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mencapai target

pengurangan kemiskinan, evaluasi akan memberikan informasi tentang faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Tantangannya adalah memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan metodologi yang benar, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan, bukan hanya formalitas.

7. Sistem Laporan Kinerja yang Transparan

- a. Tujuan: Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja pemerintah untuk memastikan akuntabilitas publik.
- b. Analisis: Program yang memfasilitasi pembuatan laporan kinerja yang terbuka dan transparan memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Laporan ini sering kali mencakup analisis pencapaian indikator, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan. Program ini dapat berupa laporan tahunan, platform daring yang memberikan update terkait status kinerja, atau aplikasi yang memungkinkan publik mengakses hasil evaluasi kinerja. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan bahwa laporan yang disusun dapat dipahami oleh publik umum dan bukan hanya oleh kalangan profesional, serta memastikan data yang disajikan tidak disembunyikan atau dimanipulasi.

8. Pengukuran Kinerja Berbasis Hasil dan Dampak

- a. Tujuan: Mengukur bukan hanya aktivitas atau output, tetapi juga dampak dan hasil nyata yang dicapai oleh program atau kegiatan.
- b. Analisis: Program pengukuran kinerja yang berbasis pada hasil dan dampak membantu memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aktivitas yang dilakukan (misalnya, jumlah pelatihan yang diselenggarakan), tetapi juga pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari program tersebut (misalnya, peningkatan keterampilan peserta). Misalnya, dalam sektor kesehatan, pengukuran kinerja tidak hanya mengukur jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga indikator kesehatan masyarakat seperti penurunan angka kematian ibu atau peningkatan status gizi. Tantangan utama adalah mengidentifikasi dan mengukur dampak jangka panjang dari suatu program, yang mungkin membutuhkan

waktu lebih lama untuk terlihat dan memerlukan data yang lebih rumit.

9. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

- a. Tujuan: Memastikan bahwa setiap aparatur negara bertanggung jawab atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Analisis: Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan memastikan bahwa setiap lembaga atau aparat pemerintah bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil yang terukur. Dalam hal ini, pemerintah mengimplementasikan sistem pelaporan yang memfasilitasi pemantauan kinerja, serta memberi penghargaan bagi lembaga atau individu yang berhasil mencapai target kinerja, serta sanksi bagi yang gagal. Program ini sering terintegrasi dengan sistem reward and punishment. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan data yang valid.

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 thn yang sudah tamat atau Sedang belajar di satuan PAUD 4.814 ----- x 100 % = 78,34 % 6.145 Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 thn yang sudah tamat atau Sedang belajar 16.632 ----- x 100 % = 88,09 % 18.880 Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada Kabupaten		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13 - 15 thn dalam pendidikan Menengah pertama 6.797 ----- x 100 % = 72,40 % 9.387 Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada Kabupaten		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan kesetaraan 600 ----- x 100 % = 20,53 % 2.922 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan		

2	KESEHATAN	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan			
		Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi 2 ----- x 100 % = 66,67 % 3 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten		
		Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1.915 ----- x 100 % = 81,52 % 2.349 Jumlah Sasaran Ibu Bersalin di Kabupaten		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan 2.041 ----- x 100 % = 86,88 % 2.349 Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 2.145 ----- x 100 % = 94,24 % 2.276 Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 9.210 ----- x 100 % = 82,66 % 11.141		

			Jumlah Balita di Kabupaten		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 21.109 ----- x 100 % = 78,20 % 26.993 Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten		
		Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 65.933 ----- x 100 % = 69,04 % 95.590 Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 9.295 ----- x 100 % = 74,49 % 12.479 Jumlah warga Negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 13.522 ----- x 100 % = 79,93 % 16.916 Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

		yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.578 ----- x 100 % = 91,49 % 5.004 Jumlah penderita DM di Kabupaten		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 310 ----- x 100 % = 100 % 310 Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.837 ----- x 100 % = 82,49 % 2.227 Jumlah penderita TBC di Kabupaten		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar 3.215 ----- x 100 % = 87,67 % 3.667 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab.		
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) 246,1 Ha ----- x 100 % = 11,09 %		

		kewenangan Kabupaten/Kota	2.220 Ha Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di wilayah sungaikewenangan Kabupaten/Kota (ha) 25,71 Ha ----- x 100 % = 571,33 % 4,50 Ha Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten (m)		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) di tahun eksisting 903,22 Ha ----- x 100 % = 34,37 % 2.627,7 Ha Luas daerah irigasi kewenangan Kabupatenn		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten 33,672 ----- x 100 % = 98,20 % 34.288 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten		

		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya tih diolah PLT + jumlah rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD 25.036 ----- x 100 % = 73,02 % 34.288 Jumlah rumah di Kabupaten		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n 15 ----- x 100 % = 100 % 15 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n		
		Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya 1.917 ----- x 100 % = 100 % 1.917 Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku		
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap di kabupaten 393,747 ----- x 100 % = 36,56 % 1.076,895 Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis		

		yang memiliki sertifikat kompetensi	106 ----- x 100 % = 70,66 % 150 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ Analisis di wilayah kabupaten		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 568 ----- x 100 % = 100 % 568 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya		
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 1 ----- x 100 % = 0 % 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (ha) yang ditangani (ha) 20,92 Ha ----- x 100 % = 34,63 % 60,4 Ha Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		

		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni 9.365 ----- x 100 % = 27,31 % 34.288 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 1.121 ----- x 100 % = 98,76 % 1.135 Jumlah unit rumah kabupaten/kota		
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan 30 ----- x 100 % = 100 % 30 Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jmlh keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi 1 ----- x 100 % = 100 % 1 Jmlh keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jmlh warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 785 ----- x 100 % = 136,75 % 574		

			Jmlh warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan		
		Jmlh warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jmlh warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 785 ----- x 100 % = 0,452 % 173.534 Jmlh warga negara yang berada dikawasan rawan bencana		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jmlh warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 43 ----- x 100 % = 100 % 43 Jmlh warga negara yang menjadi korban bencana		
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dikabupaten kota dlm tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadam di kab/kota dlm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan 22 ----- x 100 % = 100 % 22 Jumlah Kejadian Kebakaran di kabupaten /kota		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 7 Menit 8 Detik		

6	SOSIAL	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar pantai 292 ----- $\times 100\% = 99,65\%$ 293 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak Terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu anggaran 1.470 ----- $\times 100\% = 100\%$ 1.470 Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
7	KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 0 ----- $\times 100\% = 0\%$ 1 Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 1.541 ----- $\times 100\% = 6,742\%$		

			22.854 Jumlah tenaga kerja keseluruhan		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas harga konstan) 4.300,77 ----- x 100 % = 18,81 % 22.854 Jumlah tenaga kerja		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 33 ----- x 100 % = 57,89 % 57 Jumlah perusahaan		
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 113 ----- x 100 % = 21,60 % 523 Jumlah pencari kerja yang terdaftar		
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD 151.367.927.126 ----- x 100 % = 1,3244 % 11.429.131.862.213 Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani		

		instansi terkait Kabupaten/Kota	instansi tingkat kabupaten /kota yang didampingi 64 ----- x 100 % = 100 % 64 Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi Kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan 19 ----- x 100.000 = 34,05 % 55.792 Jumlah penduduk perempuan		
9	PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	Jumlah cadang pangan pemerintah kabupaten/kota 1.964 ----- x 100 % = 12,91 % 15.210,09 Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan		
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) 556,47 ----- x 100 % = 75,82 % 733,84 Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)		
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 1 Lokasi ----- x 100 % = 100 % 1 Lokasi		

			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) 833.727,83 ----- x 100 % = 23,87 % 3.491.687,62 Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan		
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yg diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha 0 ----- x 100 % = 0 % 0 Jumlah penerima tanah obyek landreform		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah 0 ----- x 100 % = 0 % 0 Luas izin membuka tanah yang diterbitkan		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 1 ----- x 100 % = 100 % 1 Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH = (0,376 x IKA 65,56) + (0,405 x IKU 92,77) + (0,219 x IKL 86,91) = 24,65 + 37,57 + 19,03 81,25 %		

		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani 18.855 ----- $\times 100\% = 75\%$ 25.180 Total volume timbunan sampah kabupaten/kota		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkaran, dan izin PPLH yang diberikan pemerintah kab/kota 485 ----- $\times 100\% = 75\%$ 486 Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP 121.324 ----- $\times 100\% = 98,55\%$ 123.098 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA 26.765 ----- $\times 100\% = 54,32\%$ 49.267 Jumlah anak usia 0-17 tahun		
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir 52.719 ----- $\times 100\% = 94,49\%$ 55.792 Jumlah anak usia 0-18 tahun		

		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 9 -----x 100 % = 22,5 % 40 Jumlah Perangkat Daerah		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 30 ----- x 100 % = 90,90 % 33 Jumlah desa tertinggal (Per-awal tahun -n)		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 19 ----- x 100 % = 25,33 % 75 Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n)		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{f \times k}$		

			pi TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama I = kelompok umur i = untuk kelompok umur 15-19 i = untuk kelompok umur 20-24, s.d i = untuk kelompok Umur 45-49 k Bilangan Konstanta biasanya 1000		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern 16.719 ----- x 100 % 25.296 Jumlah Pasangan Usia Subur		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 2.350 ----- x 100 % 25.296 Jumlah Pasangan Usia Subur		
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 0,762		
		V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota 0,15 smp/jam		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 40 ----- x 100 % = 100 %		

		Dinas Komunikasi dan Informatika	40 Jumlah PD		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi 10 ----- x 100 % = 100 % 10 Jumlah Layanan Publik		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemda lainnya 99.303 ----- x 100 % = 87,49 % 113.500 Jumlah penduduk		
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 13 ----- x 100 % = 65 % 20 Jumlah seluruh koperasi aktif		
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 106 ----- x 100 % = 6,93 % 1.528 Jumlah usaha mikro keseluruhan		
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota (Rp.156.553.643.725-Rp.176.720.315.777)		

			----- x 100 % Rp. 176.720.315.777 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten /kota 11,41 %		
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten /kota 83 ----- x 100 % = 0,178 % 46.453 Jumlah pemuda usia (16-30 tahun) di kabupaten /kota		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang Menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota 823 ----- x 100 % = 1,77 % 46.453 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten /kota		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		
20	STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 7 ----- x 100 % = 17,50 % 40 Jumlah PD		

		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 7 ----- x 100 % = 17,50 % 40 Jumlah PD		
21	PERSANDIAAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi 0 ----- x 100 % 0 Jumlah area penilaian		
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2 ----- x 100 % = 200 % 1 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan		
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat 65,69 %		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100 = 65,645$		
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		

		Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 75 %		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK 66,67 %		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota 27.348,1 ----- x 100 % = 107,13 % 25.525,8 Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan		
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan n-1 (5.499 - 4.205) ----- x 100 % = 30,77 %		

		manca negara per kebangsaan	4.205 Jumlah wisatawan tahun n-1		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun-1 (23.588 - 26.462) ----- x 100 % = -10,86 % 26.462 Jumlah wisatawan tahun n-1		
		Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 22.705 ----- x 100 % = 14,81 % 153.300 Jumlah kamar yang tersedia		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB 60,88 ----- x 100 % = 0,82 % 7.351,21 Total PDRB berlaku		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata 3.191.338.936 ----- x 100 % = 22,91 % 13.929.542.666 Total Realisasi PAD		
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 73.902,01 ----- x 100 % = 459,426 % 16.085,7 Luas panen		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah	(Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) - Jumlah		

		Kasus Penyakit Hewan Menular	Kejadian/kasus hewan menular tahun sebelumnya (269 – 1.104) ----- x 100 % = -75,63 % 1.104 Jumlah Kejadian /kasus penyakit hewan menular Tahun sebelumnya (t-1)		
28	KEHUTANAN	-	-		
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin - ----- x 100 % - Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi 663.371 ----- x 100 % = 84,20 % 787.804 RDKK		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 700 ----- x 100 % = 72,53 % 965 Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang diwilayah kab/kota		
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 (103-75) ----- x 100 % = 37,33 % 75		

			Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	182,86 %		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yg dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 103 ----- x 100 % = 100 % 103 Jumlah izin yang dikeluarkan		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jmlh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kab/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 103 ----- x 100 % = 100 % 103 Jumlah izin yang dikeluarkan		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100 % = 0 0 Jumlah izin yang dikeluarkan		

		yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) kab/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	1) Informasi industri : a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) c. Tidak menyampaikan informasi industri (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) c. Informasi bahan bakar/energi (10%) d. Informasi tenaga kerja (10%) e. Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	125	
32	TRANSMIGRASI	-	-		

NO.	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANG AN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n 0 ----- x 100 % = 0 % 1.356 Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 89 ----- x 100 % = 6,56 % 1.356 Jumlah seluruh pengadaan		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan 299.440.937.209 ----- x 100 % = 66,30 % 451.640.750.069 Total belanja operasi dan modal		

		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produl Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) 24.806.727.813,63 ----- x 100 % = 9,06 % 273.711.120.342,09 Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.008 ----- x 100 % = 67,38 % 1.496 Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 506 ----- x 100 % = 33,82 % 1.496 Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak Termaksud guru dan tenaga kesehatan)		

		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) 113 ----- x 100 % = 44,66 % 253 Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
4	Manajemen Keuangan	Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi 1.359.681.287.838,18 ----- x 100 % = 5,42 % 1.437.708.840.974 Total belanja APBD		
		Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi 85.380.828.612,50 ----- x 100 % = 114,77 % 74.392.306.220 Total PAD belanja APBD		
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) YA, ADA		

		Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA 73.874.785.847,03 ----- x 100 % = 5,14 % 1.437.708.840.974 Total belanja anggaran tahun sebelumnya		
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda 193.347.454.640,68 ----- x 100 % = 94,42 % 204.776.418.649 Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda 12 ----- x 100 % = 100 % 12 Total jumlah dokumen yang telah dirinci		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tugas Pembantuan bidang sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 DIPA Nomor DIPA. DIPA- 018.08.4.189138/2024
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tugas Pembantuan bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 DIPA Nomor DIPA SP DIPA-067.07.4.419106/2024

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Salah satu azas penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat di desentralisasikan dan di otonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:

- a. Lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. Daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya samadengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. Daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana danprasarana serta personil untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan kabupaten/kota; biaya pendamping
- e. Memperhatikan karakteristik daerah; dari daerah
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- g. Bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerahkabupaten/ kota dan Pemerintah Pusat.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah pada tugas pemerintah provinsi yang diterima dari Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan dan diberikan kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi.

3.1 Pelaksanaan Tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una

Tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una diberikan oleh Kementerian Pertanian yang dikelola oleh 2 (dua) Program kegiatan yaitu :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

3.1.1 Target Kinerja

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pembantuan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan sarana prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup dengan jumlah anggaran Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan target kinerja 100%
- b. Kegiatan bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan target kinerja 100%.
- c. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 13.150.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan target kinerja 100%.

3.1.2 Realisasi

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dan capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup diantaranya adalah:
 - 1) Tersedianya Dokumen pendukung persiapan pelaksanaan Irigasi Perpipaan Fasilitas pupuk dan pestisida
 - 2) Tersedianya 5 dokumen Rancang Bangun Oleh Jasa Konsultan
 - 3) Tersusunya Dokumen CP/CL Kelompok Penerima Bantuan
 - 4) Terdesiminasinya Teknis pelaksanaan Kegiatan Irigasi Pada Kelompok Penerima Bantuan
 - 5) Terkoordinasinya Teknis Kegiatan Irigasi Perpipaan
- b. Hasil dan capaian pelaksanaan pada urusan/ Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian diantaranya adalah
 - 1) Tersusunya Dokumen database Alsintan dan Upja
 - 2) Tersedianya Dokumen Juklak Pelaksanaan Alsintan
 - 3) Tersedianya dokumen pendukung kegiatan Alsintan dan UPJA
 - 4) Terdistribusinya Honor Petugas Input BAST online

- 5) Peningkatan Kemampuan Pengurus UPJA dalam manajemen Bisnis.
- c. Hasil dan capaian pelaksanaan pada urusan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya adalah
 - 1) Terdistribusinya Honor PPK
 - 2) Terdistribusinya Honorarium Pengelola Kegiatan
 - 3) Terdistribusinya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - 4) Terdistribusinya Honorarium Staff Pengelola
 - 5) Terdistribusinya Honorarium Penyusun Pelaporan Online

Pelaksanaan Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dikelola oleh 2 (Tiga) Program Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 DIPA Nomor SP DIPA-067.07.4.419106/2024 Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi 100%.
 - b. Hasil dan capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi diantaranya adalah:
 - 1) terlaksana sesuai perencanaan, kedepan dibutuhkan dukungan pengadaan kendaraan operasional untuk petugas SP/lintas sektor UPT. Uetangko untuk meningkatkan pelayanan kepada warga binaan transmigrasi/trasmigran
 - 2) terlaksana sesuai perencanaan, melalui koordinasi Tim Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah raga sudah terdapat kelas jauh SDN Uematopa di Uetangko dari kelas 1 s/d kelas 6 SD untuk sementara proses

belajar mengajar dilaksanakan di bangunan RTJK lama yang tidak selesai dibangun. Sudah terbentuk pengelola Taman Bacaan Masyarakat UPT. Uetangko dan mendapatkan bantuan pinjam pakai buku program/kegiatan silang layan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una pada T.A 2024 masyarakat transmigran mengusulkan Pembangunan gedung perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat UPT. Uetangko, belum tersedia pusat layanan kesehatan masyarakat dan rumah ibadah di UPT. Uetangko

- 3) terlaksana sesuai proses perencanaan
- 4) progres fisik pembangunan jembatan terlaksana sesuai perencanaan, keterbatasan pemahaman operator aplikasi dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI sehingga memperlambat proses administrasi, sering terjadi gangguan jaringan internet.
- 5) Jarak tempuh dari RTJK menuju LU1 SP1 Uetangko cukup jauh lebih kurang 4 km, sudah tersedia JUT sepanjang 2 km bersumber dari APBD Perubahan T.A 2024 Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akses jalan dari RTJK menuju Lahan Usaha 1 . Olehnya masih dibutuhkan JUT sepanjang lebih kurang 2 km dari RTJK SP 1 Uetangko menuju lahan usaha 1.

2. Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 DIPA Nomor SP DIPA-067.07.4.419106/2024 Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.585.000 dan Realisasi 100%.
- b. Hasil dan capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terlaksana sesuai perencanaan.

3.1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Tojo Una-Una yang diberikan oleh Kementrian pertanian terdiri dari 3 Program Kegiatan yaitu :

- a. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Penambahan Target-Penambahan Anggaran)
 - Dasar Pelaksanaan Kegiatan Surat Pengesahan DIPA Nomor 018.08.4.189138/2024
 - Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000
 - Realisasi 100 %
- b. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Dasar Pelaksanaan Kegiatan Surat Pengesahan DIPA Nomor 018.08.4.189138/2024
 - Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000
 - Realisasi 100 %
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Dasar Pelaksanaan Kegiatan Surat Pengesahan DIPA Nomor 018.08.4.189138/2024
 - Jumlah Anggaran Rp. 13.150.000
 - Realisasi 100 %

3.1.1 Target Kinerja

Target Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Berdasarkan DIPA-018.08.4.189138/2024 persentase pelaksanaan target 100 % dengan jumlah alokasi anggaran Rp. 523.150.000.

3.1.2 Realisasi

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 termuat pada Matriks Capaian Kinerja sebagai berikut :

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
DATA REALISASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA SARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA SATKER DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA (TP)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementrian Pertanian	DIPA-018.08.4.189138/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Penambahan Target-Penambahan Anggaran)			Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	100 %		100 %	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA (TP)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %		100 %	
4			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			Rp. 13.150.000	Rp. 13.150.000	100 %		100 %	
			JUMLAH			Rp 523,150,000	Rp 523,150,000				

3.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una yang diberikan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikelola terdiri dari 2 Program Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Dasar Pelaksanaan Kegiatan Surat Pengesahan DIPA Nomor 067.07.4.419106/2024
 - Jumlah Anggaran Rp. 569.830.000
 - Realisasi 99 %
2. Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Dasar Pelaksanaan Kegiatan Surat Pengesahan DIPA Nomor 067.07.4.419106/2024
 - Jumlah Anggaran Rp. 52.585.000
 - Realisasi 100 %

3.2.1 Target Kinerja

Target Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Berdasarkan DIPA Nomor 067.07.4.419106/2024 persentase pelaksanaan target 100 % dengan jumlah alokasi anggaran Rp. 622.415.000.

3.2.2 Realisasi

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 termuat pada Matriks Capaian Kinerja sebagai berikut :

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Pencapaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	SP DIPA-067.07.4.4 19106/2024	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Kabupaten Tojo Una-Una	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una						
			1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Tojo Una-Una	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una	Rp. 569.830.000	Rp. 554.180.000	100 %		100 %	
			2. Dukungan Manajemen Eselon I	Kabupaten Tojo	Dinas Tenaga Kerja dan	Rp. 52.585.000	Rp. 52.585.000	100%			

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Pencapaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Una-Una	Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una						
JUMLAH						Rp. 622.415.000	Rp. 606.765.000				

3.3 Permasalahan dan Kendala

3.3.1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan :

1. Kegiatan Irigasi Perpipaan yang anggarannya baru bisa didapatkan di akhir tahun oleh karena perubahan anggaran, berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang kesannya sedikit tergesa gesa dan kurang optimal.
2. Curah hujan yang tinggi di akhir tahun, menyebabkan salah satu lokasi kegiatan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari yang sudah disepakati bersama.

Solusi :

1. Satker dan Tim Teknis perlu lebih sering mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lokasi, sehingga bisa melakukan antisipasi dan pengambilan tindakan dengan cepat jika ada kendala teknis di lapangan.
2. Perlu di analisis lokasi pembangunan Irigasi Perpipaan yang tepat, sehingga terhindar dari segala konsekuensi perubahan cuaca ekstrim.

3.3.2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam melaksanakan tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlaksana dengan baik dan sesuai proses perencanaan.

a. Saran dan Tindak Lanjut

1. Frekuensi anggaran Perjalanan Dinas untuk Monev kegiatan perlu di tingkatkan.
2. Tim Teknis perlu penempatan orang- orang yang tepat dan paham lokasi.

Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melakukan perbaikan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait bantuan pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah secara minimal yang berhak diperoleh setiap warganya. Pada ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mengukur kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengadakannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing Unit Kerja. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja dari Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah, dimana terdapat 6 bidang yang menjadi urusan wajib terkait SPM di tingkat Kabupaten. Pada tahun 2024 Indeks Pencapaian SPM Kabupaten Tojo Una-Una berada pada angka 92,36% dengan tingkat keterisian pada aplikasi 97,02%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

NO	URUSAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		Tingkat Keterisian	Nilai Capaian	Tingkat Keterisian	Nilai Capaian	Tingkat Keterisian	Nilai Capaian	Tingkat Keterisian	Nilai Capaian
1	PENDIDIKAN	98,04%	76,47%	98,04 %	76,48%	98,04%	80,98%	100%	90,99%
2	KESEHATAN	97,35%	45,76%	100%	61,27%	98,90%	67,23%	100%	85,87%
3	PEKERJAAN UMUM	100%	82,18%	100%	82,18%	77,78%	80,49%	100%	85,73%
4	PERUMAHAN RAKYAT	87,50%	90,00%	100%	95,00%	100%	100,00%	100%	95,00%
5	TRANSTIBUMLINMAS	96,43%	93,33%	100%	96,67%	100%	96,67%	82,14%	96,67%
6	SOSIAL	84,62%	94,89%	93,33%	97,56%	95,00%	98,58%	100%	99,88%
TINGKAT CAPAIAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA		93,99%	80,44%	98,56%	84,86%	94,95%	87,33%	97,02%	92,36%

4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan sedangkan Penerima Mutu Layanan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah urusan pendidikan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)
Pendidikan anak usia dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

- b. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
- 2. Pendidikan Dasar
 - a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)
Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)
 - b. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
- 3. Pendidikan Non Formatl / Kesetaraan
 - a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)
Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
 - b. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Penentuan target pencapaian SPM urusan Pendidikan untuk Tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tanggal 18 Februari 2023, Tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun target tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	6.145
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD dan SMP)	28.267
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraasn (Paket A, Paket B dan Paket C	6.438

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.3
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			80,99%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					72,44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6145	5564	581	90,55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18,11%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90,55%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	85,75	14,25	85,75%
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	74,61	25,39	74,61%
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	52,93	44,79	8,14	84,62%
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	25,85	25,85	0	100,00%
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00%
	6 . Indeks distribusi guru	%	50	50	0	100,00%
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0,1	0,1	0	100,00%
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	4,29	4,29	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	1,43	1	0,43	69,93%
2 .	Pendidikan Dasar					89,71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71,74%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		28267	25348	2919	89,67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17,97%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89,85%
	SD					91,15%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	101,9	-1,9	100,00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99,33	0,67	99,33%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	48,53	54,99	-6,46	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	36,88	46,11	-9,23	100,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2,8	2,8	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,67	0,67	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73,19	70,97	2,22	96,97%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,89	71,4	-0,51	100,00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,81	53,2	7,61	87,49%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100,00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,26	0,26	0	100,00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	26,31	26,31	0	100,00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	1,22	98,78	1,22%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SMP					88,55%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	109	-9	100,00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	94,71	5,29	94,71%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	59,15	50,58	8,57	85,51%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	58,75	49,35	9,4	84,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4,64	4,64	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,99	0,99	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70,22	67,52	2,7	96,15%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68,32	71,47	-3,15	100,00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,54	54,19	6,35	89,51%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100,00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,26	0,26	0	100,00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	26,31	26,31	0	100,00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	1,2	98,8	1,20%
3 .	Pendidikan Kesetaraan					62,72%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	43,73%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		6438	3519	2919	54,66%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18,99%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94,94%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100,00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	34,23	65,77	34,23%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	40,88	40,88	0	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	45,89	45,89	0	100,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4,77	4,77	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,59	2,59	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	66,21	66,21	0	100,00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	60,52	60,52	0	100,00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,19	53,19	0	100,00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100,00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100,00%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan tahun 2024 di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 26,14% dari APBD yaitu Rp. 375.941.905.351,00 dengan alokasi anggaran penerapan SPM sebesar Rp. 82.944.596.062,00 dengan rincian disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	375,941,905,351
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	82,944,596,062
	APBD	82,944,596,062
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	31,724,083,062
	C. APBD DAK FISIK	21,207,833,000
	D. APBD DAK NON FISIK	30,012,680,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.5
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				89,158,748,317	88,308,032,118	99.05 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			45,558,949,000	45,295,024,718	99.42 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1,181,688,750	1,179,924,500	99.85 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	520,000,000	515,224,000	99.08 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1,392,000,000	1,390,590,000	99.90 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,665,000,000	1,650,460,000	99.13 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	310,665,250	309,950,000	99.77 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	520,000,000	517,702,000	99.56 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,347,500,000	1,324,095,000	98.26 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	2,144,731,000	2,141,053,500	99.83 %
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	0	0	0%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	600,000,000	598,335,000	99.72 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	0	0	0%
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	788,415,000	786,329,860	99.74 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	17,463,935,000	17,444,753,000	99.89 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	2,955,000,000	2,924,194,000	98.96 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	320,666,000	318,050,308	99.18 %
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	214,676,000	214,395,880	99.87 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	286,686,000	285,662,080	99.64 %
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	979,580,000	894,838,590	91.35 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	9,148,660,000	9,121,073,000	99.70 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	266,486,000	265,481,000	99.62 %
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,453,260,000	3,412,913,000	98.83 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			25,804,604,128	25,587,500,603	99.16 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	806,741,000	803,071,000	99.55 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1,675,000,000	1,667,720,000	99.57 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,770,500,000	1,755,517,000	99.15 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	250,000,000	246,968,000	98.79 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	75,000,000	74,800,000	99.73 %
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	237,888,000	237,600,000	99.88 %
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	585,000,000	580,900,000	99.30 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1,017,110,000	947,549,400	93.16 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	398,475,000	398,461,000	100.00 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	0	0	0%
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	6,690,055,128	6,600,083,343	98.66 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	7,349,945,000	7,349,945,000	100.00 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Satuan Pendidikan Menengah Pertama				
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	316,166,000	312,401,360	98.81 %
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	731,034,000	723,348,500	98.95 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	3,822,940,000	3,810,536,000	99.68 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	78,750,000	78,600,000	99.81 %
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			8,574,807,400	8,426,237,339	98.27 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	0	0	0%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	85,000,000	84,855,000	99.83 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	100,980,000	90,553,000	89.67 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	390,000,000	389,210,000	99.80 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	202,876,000	202,831,000	99.98 %
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	763,060,000	740,606,939	97.06 %
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	236,358,400	236,358,400	100.00 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	3,489,600,000	3,406,764,000	97.63 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0%
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	385,058,000	385,058,000	100.00 %
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	998,545,000	990,768,000	99.22 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,748,330,000	1,724,443,000	98.63 %
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	175,000,000	174,790,000	99.88 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9,220,387,789	8,999,269,458	97.60 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	4,238,710,000	4,228,610,000	99.76 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,709,200,000	1,595,940,000	93.37 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	3,046,667,789	2,952,667,653	96.91 %
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	225,810,000	222,051,805	98.34 %
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
		JUMLAH PROGRAM			89,158,748,317	88,308,032,118	99.05 %

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 personil sejumlah 4.205 Orang yang terdiri atas pejabat dan staf di Dinas juga oleh kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Rincian jumlah personil pendukung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Personil Pendukung
Tahun 2024

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	15 Orang
	a. II.b	1 Orang
	b. III.a	1 Orang
	c. III.b	4 Orang
	d. IV.a	9 Orang
2	Jabatan Fungsional	4190 Orang
	a. Guru PNS (TK, SD, SMP)	3.294 Orang
	b. Guru PPPK (TK, SD, SMP)	368 Orang
	c. Kepala Sekolah	462 Orang
	d. JFT Ahli Madya	12 Orang
	e. JFT Ahli Muda	5 Orang
	f. Staf Honorer Kantor	49 Orang
	Jumlah Total	4.205 Orang

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, olehnya diperlukan Solusi yang konkrit untuk penyelesaian masalah tersebut baik.

4.1.6.1 Permasalahan

- Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kementerian Agama Kabupaten hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat

- Belum memiliki data anak yang bersekolah diluar dari Kabupaten Tojo Una-Una baik tingkatan SD, SMP maupun SMA sehingga apabila dibandingkan dengan total anak yang berusia sekolah di kabupaten Tojo Una-Una maka akan terlihat presentase angka partisipasi anak sekolah akan rendah.
- Masih rendahnya Nilai Rapor Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una.
- Admin Dapodik belum semua mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi serta masih banyak Satuan Pendidikan yang tidak memiliki operator tetap (Operator Tembak) terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Operator Sekolah belum melakukan inputan, verifikasi dan validasi data dapodik secara berkala

4.1.6.2 Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan dibutuhkan solusi diantaranya sebagai berikut :

- Perlunya Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Agama di tingkat Kabupaten untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel.
- Pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
- Perlunya peningkatan kapasitas Admin Dapodik serta mengangkat Operator tetap di di satuan pendidikan
- Perlu di jadwalkan secara berkala desk verifikasi data pendidikan di semua satuan pendidikan.
- Melakukan Bimbingan Teknis Operator Dapodik minimal sekali setahun sebelum Cut Off bulan Maret.

4.2 Urusan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Permenkes ini mengatur standar teknis pemenuhan SPM Kesehatan. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 menggantikan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, maka Jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
4. Pelayanan Kesehatan Balita
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun keatas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

9. Pelayanan Kesehatan Dasar Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (Tuberkulosis)

Setiap orang dengan TB (Tuberkulosis) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan kesehatan adalah 100% setiap tahunnya. SPM adalah minimal pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Untuk mencapai target SPM, pemerintah daerah harus memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam SPM.

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus Sesuai Standar	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa berat Sesuai Standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.2.3 Realisasi Pencapaian

Tabel 4.8
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			85.87 %
1 .	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL					85.40 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.87 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	2349	1934	415	82.33 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.53 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.67 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2349	2349	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	187920	187920	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	2349	2349	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3614	3614	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2673	2673	0	100.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1854	1854	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1552	1552	0	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2522	2522	0	100.00 %
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3031	2369	662	78.16 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	247	247	0	100.00 %
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	195	195	0	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	20	20	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	109	109	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	268	268	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	23	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	16	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	2349	1931	418	82.21 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					88.96 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.44 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	2349	2039	310	86.80 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.51 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.57 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	2349	2349	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2349	2349	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	3031	2369	662	78.16 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	331	331	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	20	20	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	281	281	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	110	110	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	16	16	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	16	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					95.04 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.22 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	2276	2140	136	94.02 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.82 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.11 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	2549	2549	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	1964	1964	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2276	2276	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	2654	2654	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	2709	2709	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2276	2276	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	146	146	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	20	20	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	281	281	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	116	116	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	16	16	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	16	16	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	14	2	87.50 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	481	481	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					85.19 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.79 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	11141	9162	1979	82.24 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.41 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.03 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	2419	2419	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	2419	2419	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	11141	6932	4209	62.22 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2254	2254	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	14328	10791	3537	75.31 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2409	2409	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3345	3345	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2499	2499	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2822	2822	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2289	2289	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2370	2370	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2311	2311	0	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	33110	33110	0	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	16	16	0	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	16	16	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	212	212	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	89	89	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	22	22	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	248	248	0	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	822	822	0	100.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					69.61 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	51.74 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	32637	21109	11528	64.68 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					17.87 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89.33 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	26953	19954	6999	74.03 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	6576	29	6547	0.44 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	26953	26953	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	5622	5622	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	673	673	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	95599	95599	0	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	16	16	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	9209	3082	6127	33.47 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	16	16	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	3631	3631	0	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	16	16	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	16	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	16	16	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	109	109	0	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	104	104	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					75.42 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.42 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	96590	66909	29681	69.27 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16	16	0	100.00 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	102	102	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	51	51	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	96	96	0	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	26	26	0	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	96590	96590	0	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	39	39	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	96590	96590	0	100.00 %
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	16	16	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	16	16	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	48	48	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	16	16	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	72	72	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	28	28	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	77	77	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	62	62	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	18	18	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	257	257	0	100.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					78.47 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59.30 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	12479	9250	3229	74.12 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.18 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.88 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	16	16	0	100.00 %
	2 . Glukometer /alat pemeriksaan gula darah	Paket	96	96	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	16	16	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	12479	12479	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	16	16	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	12479	5788	6691	46.38 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16	16	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	20	20	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	91	91	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	74	74	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	17	17	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	246	246	0	100.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					83.95 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.95 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	16916	13522	3394	79.94 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	16	16	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	595097	595097	0	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	61	61	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	16	16	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	16	16	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	16	16	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	162	162	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	44	44	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	16	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	16	16	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	16	16	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					93,19%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.19 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	5004	4578	426	91.49 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	5004	5004	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	96	96	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	17760	17760	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	16	16	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	16	16	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	16	16	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	82	82	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	64	64	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	16	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	16	16	0	100.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	310	310	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Dilayani / Dipenuhi			
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	16	16	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	4	4	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1274	1274	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	16	16	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	16	16	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	16	16	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	16	16	0	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	16	16	0	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	16	16	0	100.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					85.36 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.99 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	2227	1837	390	82.49 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.37 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.86 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16	16	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	16	16	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	16	16	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2616	2616	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	2565	2000	565	77.97 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	16	16	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	16	16	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	80	60	20	75.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	17	17	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	41	41	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	21	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	16	16	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	581	581	0	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					89.79 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.14 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	3667	3215	452	87.67 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.65 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.24 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16	16	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	3667	3667	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3667	3667	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	16	16	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	16	16	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	54	54	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	20	20	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	29	29	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	34	28	6	82.35 %

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan KMK No. 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar anggaran Gaji Pegawai. Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2024 di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp. 134.778.300,680,00 dengan alokasi anggaran penerapan SPM sebesar Rp. 4.977.432.438,00 dengan rincian disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	134,778,300,680
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4,977,432,438
	APBD	4,977,432,438
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	591,660,240
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	4,385,772,198
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.10
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran SPM Urusan Kesehatan
Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4,977,432,438	3,251,775,484	65.33%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4,977,432,438	3,251,775,484	65.33%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,048,353,000	606,528,000	65.33 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	359,305,240	61,180,000	57.86 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	81,600,000	44,292,500	17.03%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1,196,796,343	777,521,343	54.28%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	759,640,000	549,130,000	64.97%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	595,593,609	586,402,607	72.29%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	91,517,143	74,117,143	98.46%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	87,671,408	71,291,407	80.99%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	87,671,409	68,505,341	81.32%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	15,020,000	12,900,000	78.14%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	326,957,143	268,657,143	85.89%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	327,307,143	131,250,000	82.17%
			JUMLAH PROGRAM		4,977,432,438	3,251,775,484	65.33%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.2.5 Dukungan Personil

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di antaranya adalah keterbatasan logistik dan estimasi data. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut di antaranya adalah komitmen kepala daerah dan DPRD, penguatan biro pemerintahan, dan evaluasi pelaksanaan.

4.2.6.1 Permasalahan

- Sulit mendapatkan data Sasaran penduduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menyediakan data berdasarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan, juga lambatnya penyediaan data dimaksud dari Pemerintah Desa.
- Masyarakat tidak memiliki KTP.
- Berbeda definisi operasional tentang penduduk di desa antara beberapa penyedia data.
- Aplikasi Pelayanan di Puskesmas belum terintegrasi dengan data masyarakat miskin sehingga sulit menghitung kebutuhan terutama masyarakat miskin.
- Penyusunan perencanaan melalui siscobikes tidak dilaksanakan secara rutin.
- Belum terintegrasi dengan lintas sektor terkait untuk perencanaan mencapai SPM Bidang Kesehatan.
- Kompetensi kader masih rendah,
- Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) belum terintegrasi.
- Masyarakat belum sadar untuk datang ke Posyandu/Posbindu,
- Aplikasi Pelayanan fasilitas swasta dan pemerintah belum terintegrasi sehingga masyarakat yang dilayani di fasilitas swasta tidak otomatis dilaporkan.

- Akses jalan yang sulit ke wilayah-wilayah sangat terpencil, membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) hari jalan kaki karena wilayah tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor.

4.2.6.2 Solusi

- Perlunya pelayanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat masyarakat desa terjauh, terluar dan terpencil sehingga proses pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan pencatatan administrasi yang sesuai. Hal ini juga mengharuskan koordinasi dan integrasi program antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Perlunya optimalisasi penyusunan perencanaan melalui siscobikes dan optimalisasi integrasi program dengan lintas sektor terkait.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya kader kesehatan di tingkat desa, pelaksanaan sosialisasi UKBM dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin melalui Posyandu/Posbindu.
- Perlunya integrasi aplikasi pada fasilitas kesehatan swasta.
- Perlunya peningkatan kapasitas akses jalan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau (terluar, terjauh, terpencil).

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum kewenangan kabupaten adalah Penyediaan air minum sehari-hari, Pengolahan air limbah domestik. Penerima layanan dasar SPM pekerjaan umum meliputi Rumah tangga, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.11

Target penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.3.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yaitu 92,81% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			85,73%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					98,43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,56%
	JUMLAH YANG HARUS DIPENUHI	Orang	171440	168360	3080	98,20%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,87%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	99,36%
	JARINGAN PERPIPAAN					

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	34039	33604	435	98,72%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	34039	33604	435	98,72%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	249	0	249	100,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	249	0	249	100,00%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					73,02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58,41%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah yang Harus Dilayani :		171440	125180	46260	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14,60%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	73,02%
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	34288	25036	9252	73,02%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	34288	25036	9252	73,02%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	34288	25036	9252	73,02%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah Rp. 195.294.329.426,00 sebanyak 10,20% dialokasikan untuk pencapaian SPM yakni sejumlah Rp. 19.934.954.990,00 dengan rincian sumber dana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	195,294,329,426
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	19,934,954,990
	APBD	19,934,954,990
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	11,934,954,990
	C. APBD DAK FISIK	8,000,000,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.14
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TOJO UNA UNA				19,934,954,990	19,669,217,620	98.67 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				0	0	0.00 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			0	0	0.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				138,670,000	130,320,000	93.98 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			138,670,000	130,320,000	93.98 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	138,670,000	130,320,000	93.98 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		26,332,000	21,972,000	83.44 %
		2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		12,179,173,990	12,025,977,720	98.74 %
		3.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		7,590,779,000	7,490,947,900	98.68 %

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.3.5 Dukungan Personil

Tabel 4.15

Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	10 orang
	a. II.b	1 Orang
	b. III.a	1 Orang
	c. III.b	5 Orang
	d. IV.a	3 Orang
2	Jabatan Fungsional	
	a. ASN	77 Orang
	b. Non ASN	144 Orang
	Jumlah Total	231 Orang

Sumber Data : Dinas PUPRPKPP Tahun 2024

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

4.3.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM :

- Kinerja pelayanan sarana dan prasarana dasar yang belum optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang telah dibangun sehingga mengurangi umur rencana.
- Belum optimalnya kelembagaan yang telah dibentuk baik itu kelompok pemelihara sistem penyediaan air minum (KP-SPAM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) Sanitasi
- Berkurangnya sumber air permukaan di beberapa wilayah

4.3.6.2 Solusi

Adapun solusi yang akan dilakukan adalah :

- Pentingnya dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi
- Peningkatan kapasitas KP-SPAM dan KPP Sanitasi dalam mengelola sarana air minum dan sanitasi

Penerapan perda perlindungan sumber mata air

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran pelaksanaan program/kegiatan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar minimal.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Rincian terget capaian SPM urusan Perumahan Rakyat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.4.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat dapat dilakukan dengan menyediakan dan merehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Adapun realisasi capaian SPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17
Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			95,00%
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10	10	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	8	8	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2	2	0	100,00%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100,00%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	0	100,00%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					80,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	50,00%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0,00%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0,00%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0,00%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0,00%
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	5	5	0	100,00%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	195,294,329,426
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	341.110,000
	APBD	341.110.000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	341.110.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.19
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TOJO UNA UNA				341,110,000	338,155,000	99.13 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				341,110,000	338,155,000	99.13 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			10,000,000	9,970,000	99.70 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	10,000,000	9,970,000	99.70 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			331,110,000	328,185,000	99.12 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	331,110,000	328,185,000	99.12 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena	Unit Rumah	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Relokasi Program Kabupaten/Kota				
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Tabel 4.20

Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	10 orang
	e. II.b	1 Orang
	f. III.a	1 Orang
	g. III.b	5 Orang
	h. IV.a	3 Orang
2	Jabatan Fungsional	
	a. ASN	77 Orang
	b. Non ASN	144 Orang
	Jumlah Total	232 Orang

Sumber Data : Dinas PUPRPKPP Tahun 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

4.4.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM :

- Kurang optimalnya pendataan terhadap rumah dan warga pada lokasi rawan bencana dan pasca bencana
- Kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam menentukan lahan potensial sebagai alternatif relokasi apabila terjadi bencana

Minimnya keswadayaan dan semangat gotong royong dalam tahap pembangunan baru dan rehabilitasi rumah terdampak bencana

4.4.6.2 Solusi

Adapun langkah-langkah yang akan dijadikan

- Mengoptimalkan pendataan terhadap rumah dan warga pada lokasi rawan dan pasca bencana dengan melakukan pengumpulan data secara berkala.
- Meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi melalui pemerintah desa dan kelurahan terkait penentuan lokasi lahan potensial sebagai alternatif relokasi.

- Mengasah kembali semangat gotong royong melalui pemerintah desa dan kelurahan serta berkoordinasi dengan polres dan koramil dalam tahap pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Propinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai sasaran pelaksanaan program/kegiatan meliputi:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Capaian SPM

Target 4.21

Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Persentase perlindungan masyarakat urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
----	---	---	------

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.5.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM Urusan Trantibumlinmas secara umum 88,33% dengan rincian capaian per masing-masing indikator yaitu capaian SPM trantibum (Satuan Polisi Pamong Praja) 96,67%, capaian SPM Kebencanaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 68,33% dan capaian SPM Damkar 100%. Adapun rincian capaian masing-masing layanan disajikan dibawah ini.

Tabel 4.22
Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			96,67%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					96,67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28	28	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			16,67%
			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	4	4	0	100,00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	7	7	0	100,00%
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	1	1	0	100,00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0,00%
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100,00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS MUDA			68,33%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	0,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			5,00%
		Orang	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	25,00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	0	0	0	0,00%
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	0	0	0	0,00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	785	785	0	100,00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0	0,00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1	1	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	1	1	0	100,00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	7	7	0	100,00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100,00%
	ya		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang	Jumlah Mutu Barang	Jumlah Mutu Barang /	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			/Jasa Yang Dibutuhkan	/Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	1	1	0	100,00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1	1	0	100,00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	1	1	0	100,00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1	1	0	100,00%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	24	24	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	22	22	0	100,00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1	1	0	100,00%
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	31	31	0	100,00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	63	63	0	100,00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	22	22	0	100,00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	10	10	0	100,00%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.23
Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,023,317,570
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0
	APBD	0
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.24
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Trantibumlinmas
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TOJO UNA UNA				2,031,517,470	2,015,733,801	99.22 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				856,326,850	847,126,133	98.93 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			846,326,850	837,316,133	98.94 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	846,326,850	837,316,133	98.94 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	0	0	0%
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			10,000,000	9,810,000	98.10 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	10,000,000	9,810,000	98.10 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			0	0	0.00 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				766,104,920	761,678,625	99.42 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			302,744,000	301,263,000	99.51 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	302,744,000	301,263,000	99.51 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			0	0	0.00 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			358,287,920	356,565,625	99.52 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	358,287,920	356,565,625	99.52 %
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			105,073,000	103,850,000	98.84 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	105,073,000	103,850,000	98.84 %
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				409,085,700	406,929,043	99.47 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0.00 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			409,085,700	406,929,043	99.47 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	409,085,700	406,929,043	99.47 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelayanan SPM urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk layanan Trantibum dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Layanan Kebencanaan. Dukungan personil untuk masing-masing perangkat daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibum dan Damkar

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	9 orang
	a. II.b	1 Orang
	b. III.a	1 Orang
	c. III.b	4 Orang
	d. IV.a	3 Orang
2	Jabatan Fungsional	
	a. ASN	32 Orang
	b. Non ASN	327 Orang
	Jumlah Total	366 Orang

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Tabel 4.26
Dukungan Personil SPM Urusan Kebencanaan

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	9 orang
	e. II.b	1 Orang
	f. III.a	1 Orang
	g. III.b	4 Orang
	h. IV.a	3 Orang
2	Jabatan Fungsional	
	a. ASN	20 Orang
	b. Non ASN	15 Orang
	Jumlah Total	44 Orang

Sumber Data : BPBD Tahun 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

4.5.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM :

- Kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sat.Pol-PP terutama gedung Kantor;
- Kualitas Sumber Daya Aparatur masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada PP nomor 16 tahun 2018 tentang Sat.Pol-PP;
- Belum tersedianya PPNS;
- Kurangnya ketersediaan anggaran peningkatan kualitas SDA dan kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas Sat.Pol-PP dan Pemadam Kebakaran;
- Satpolpp Tidak memiliki anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan SPM, selama ini menggunakan anggaran APBD yang tersedia dalam Dokumen pelaksanaan Kegiatan;
- Belum tersedianya dokumen Kajian Rawan Bencana yang disebabkan keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen tersebut, sehingga kegiatan yang ada tidak maksimal pelaksanaannya;
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal program penanggulangan bencana;
- Kurangnya dukungan anggaran dalam hal peningkatan kualitas SDM dan kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan program penanggulangan bencana;
- Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penerapan SPM mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.5.6.2 Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya penambahan Anggaran Operasional Sat.Pol-PP;

- Perlu adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia SATPOLPP melalui DIKLAT PPNS dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional SATPOLPP dan Penganggarannya;
- Perlu adanya Pembangunan Gedung Kantor Sat.Pol-PP dan Penganggarannya;
- Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana DAMKAR khususnya mobil pemadam kebakaran dan Penganggarannya;
- Perlu adanya rekrutmen PNS Pemadam Kebakaran;
- Perlu adanya anggaran Penegakkan Peraturan Daerah;
- Perlunya diberikan anggaran terkait Kegiatan SPM untuk pelaksanaan tugas Trantibum;
- Perlu adanya dukungan dana untuk penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui diklat kebencanaan serta uji kompetensi jabatan fungsional dan penganggarannya;
- Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah khususnya mobil/motor operasional (Rescue), speedboat, tenda pengungsi, alat pelindung diri (APD) dan penganggarannya;
- Perlu diberikan anggaran terkait kegiatan SPM untuk pelaksanaan tugas trantibumlinmas.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten Kota dengan sasaran pelaksanaan program/kegiatan meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial

hususnya gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu 1(satu) tahun, termasuk hitungan pembiayaan. Target rata rata capaian SPM Bidang urusan Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah :

Tabel 4.27

Target Capaian SPM Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi dasarnya diluar panti	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Diluar Panti Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	100%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.6.3 Realisasi

Nilai rata-rata target capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yaitu 99,88% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,88%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					99,38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	119	119	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,38%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	96,92%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	119	119	0	100,00%
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	117	117	0	100,00%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	4	1	80,00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100,00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	3	3	0	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	119	119	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	119	119	0	100,00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100,00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	4	1	80,00%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	83	83	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	83	83	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	49	49	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Penyediaan sandang	Orang	33	33	0	100,00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100,00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym	Orang	83	83	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	83	83	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	41	41	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	4	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	0	0	0	100,00%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	89	89	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	89	89	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	76	76	0	100,00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100,00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	3	3	0	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym	Orang	89	89	0	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	89	89	0	100,00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	89	89	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100,00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2	2	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2	2	0	100,00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100,00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100,00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100,00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	0	100,00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100,00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	100,00%
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1470	1470	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	1470	1470	0	100,00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1470	1470	0	100,00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3	3	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	408	408	0	100,00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	50	50	0	100,00%

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Tojo Una-una yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tojo Una-una, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan sedangkan yang belum tercapai dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial :

Tabel 2.29
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. TOJO UNA UNA	1.437.708.835.973,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	10,095,427,632
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,524,442,750
	APBD	393,342,750
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	393,342,750
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	2,131,100,000

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

Tabel 4.30
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran SPM Urusan Sosial
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	INDIKATOR CAPAIAN SPM				2,524,442,750	2,520,716,130	99.85 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				393,342,750	389,616,130	99.05 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			280,918,000	278,106,380	99.00 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	163,620,000	162,878,000	99.55 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	111,298,000	110,868,380	99.61 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	6,000,000	4,360,000	72.67 %
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			112,424,750	111,509,750	99.19 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	68,928,000	68,868,000	99.91 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	8,290,000	8,190,000	98.79 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	22,386,750	22,241,750	99.35 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	12,820,000	12,210,000	95.24 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	ATENSI (PERMAKANAN DAN SANDANG)		113,100,000	113,100,000	100.00 %
		2.	BANTUAN ALAT BANTU PADA HARI DISABILITAS		6,000,000	6,000,000	100.00 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		3.	PKH		1,992,000,000	1,992,000,000	100.00 %	
		4.	BANTUAN PERMAKINAN UNTUK ANAK (DINSOSPROP)		20,000,000	20,000,000	100.00 %	

Sumber Data : Aplikasi e-SPM Per 20 Januari 2025

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 4.31
Data Personil SPM Urusan Sosial

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Esselon	11 orang
	a. II.b	1 Orang
	b. III.a	1 Orang
	c. III.b	4 Orang
	d. IV.a	4 Orang
	e. IV.b	1 Orang
2	Jabatan Fungsional	
	a. ASN	27 Orang
	b. Non ASN	105 Orang
	Jumlah Total	143 Orang

Sumber Data : Dinas Sosial PPPA Tahun 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

4.6.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM :

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdata untuk dilakukan perhitungan kebutuhan;
- Terkait hal teknis pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal

4.6.6.2 Solusi

Solusi yang akan dilakukan :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak kelurahan desa terkait update data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Melakukan koordinasi lintas sektor terkait perhitungan dan perencanaan kebutuhan serta pelaksanaan SPM;
- Peningkatan SDM pengelola pelayanan kesejahteraan sosial melalui diklat dan bimtek.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SPM adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada warga negara. Adapun rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah pengampu SPM disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.32
Program Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Pengampu SPM
Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		821.335.103.271,00	778.938.712.343,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		346.134.593.358,00	322.498.704.303,00
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		346.134.593.358,00	322.498.704.303,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	256.975.845.041,00	234.114.762.830,00
		Program pengelolaan pendidikan	89.158.748.317,00	88.383.941.473,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		252.688.328.444,00	243.720.950.390,81
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		127.060.545.680,00	119.354.258.729,81
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	62.747.594.826,00	58.679.641.450,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	62.273.157.073,00	58.683.440.925,81
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.437.165.100,00	1.414.491.354,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	366.131.000,00	358.461.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	236.497.681,00	218.224.000,00
		Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	183.938.966.426,00	175.946.096.473,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		183.938.966.426,00	175.946.096.473,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	13.624.011.562,00	12.758.169.945,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	13.718.067.800,00	13.685.004.872,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	138.670.000,00	130.320.000,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.122.884.035,00	6.115.593.000,00
		Program pengembangan permukiman	19.796.284.990,00	19.538.897.620,00
		Program penataan bangunan gedung	710.849.000,00	710.082.802,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	20.551.027.836,00	20.047.482.453,00
		Program penyelenggaraan jalan	108.582.461.203,00	102.366.340.532,00
		Program pengembangan jasa konstruksi	230.552.000,00	130.965.610,00
		Program penyelenggaraan penataan ruang	464.158.000,00	463.239.639,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		11.223.373.000,00	10.808.733.290,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
		Program pengembangan perumahan	341.110.000,00	338.155.000,00
		Program kawasan permukiman	1.639.060.000,00	1.635.250.000,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	9.243.203.000,00	8.835.328.290,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		13.528.811.833,00	12.899.615.721,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.271.599.183,00	11.645.560.545,00
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	848.126.950,00	847.126.133,00
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	409.085.700,00	406.929.043,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		4.558.957.578,00	4.405.366.813,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.792.852.658,00	3.643.688.128,00
		Program penanggulangan bencana	766.104.920,00	761.678.685,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		9.262.072.632,00	8.659.245.353,00
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.262.072.632,00	8.659.245.353,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.141.139.882,00	5.550.097.603,00
		Program pemberdayaan sosial	767.750.000,00	764.222.120,00
		Program rehabilitasi sosial	282.418.000,00	279.606.380,00

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
		Program perlindungan dan jaminan sosial	1.920.400.000,00	1.915.969.500,00
		Program penanganan bencana	140.174.750,00	139.159.750,00
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	10.190.000,00	10.190.000,00
	JUMLAH		1.437.708.835.973,00	1.377.190.655.956,31

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan pembaharuan pada sistem tersebut dengan tujuan agar seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.
2. Terkait dengan pengumpulan elemen data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah serta unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
3. Pada penyusunan LPPD tahun 2024 ini fokus penginputan IKK Outcome saja, data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih spesifik serta menyeluruh terhadap kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una.

5.2 Saran

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2024 ini dalam pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome mohon kiranya dapat disesuaikan dengan existing Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengingat secara kewenangan dan tugas fungsi Perangkat Daerah yang ada berbeda dengan Kabupaten lainnya di Indonesia.
2. Pembaharuan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang di miliki oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait dengan data Asimetris yang di laporkan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten Tojo Una-Una semoga dapat memberikan gambaran V-2 secara

jelas kondisi Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Terkait dengan sumber data yang tertuang dalam LPPD semoga dapat di jadikan basis data oleh Pemerintah Pusat dalam implelementasi kebijakan serta sasaran strategis guna mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Kabupaten Tojo Una-Una Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.